



LAPORAN BERJENJANG TRIWULAN - 4

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025



LAPORAN KINERJA TRIWULAN – 4 SEKRETARIS

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan kinerja triwulan 3 Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Tidak lepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi penyusun bahasa maupun segi lainnya, yang sangat jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan waktu.

Akhir kata kami berharap semoga Laporan ini dapat bermanfaat dalam upaya untuk mewujudkan konsistensi kami dalam pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi secara berkala sehingga daerah Kabupaten Luwu Timur lebih baik di masa yang akan datang dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Malili, 02 Januari 2026

SEKRETARIS BADAN,



DARMAWANTI, SH.

Pangkat :Pembina Tk.I

Nip. 19690713 200312 2 001

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing Instansi.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan sasaran yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan, dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Penyusunan Laporan Kinerja mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

Maksud

- a. Memberikan informasi dan pertanggungjawaban kinerja yang terukur secara tertulis kepada Atasan Langsung atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Sub Bagian Perencanaan dan keuangan
- b. Memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja dalam rangka mewujudkan Laporan Kinerja tujuan dan sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur secara baik dan benar yang

didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

- c. Sebagai sarana informasi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip good governance. Sebagai salah satu bahan penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah:

- a. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.
- b. Melakukan perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja instansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.
- c. Menerapkan fungsi manajemen kinerja yang baik dan benar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.
- d. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

❖ PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen karena akan menentukan keberhasilan kegiatan yang telah direncanakan. Rencana Strategis menjadi tuntunan dan petunjuk yang memberi arah tujuan dan sasaran pada kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.

Perjanjian Kinerja berisi perjanjian dalam hal ini sekretaris kepada atasan langsung dalam hal ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mewujudkan target kinerja tahun berjalan.

Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi dari rencana strategis Tahun 2025 - 2029, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatan. Target ini dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Performance Plan) Tahun 2025

Adapun Penetapan/Perjanjian Kinerja Sekretaris Tahun 2025 sebagaimana Tabel di bawah ini:

Tabel 2
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
SEKRETARIS BADAN KESBANGPOL

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%
1.	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100%
2.	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%
3.	Terlaksananya administrasi dan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100%
4.	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
5.	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100%
6.	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase BMD perangkat daerah penunjang yang terpenuhi	100%
7.	Tersedianya jasa pendukung dan sarana penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
8.	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah siap pakai	Persentase barang milik daerah penunjang pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat suatu kegiatan/program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dari organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi Kabupaten Luwu Timur.

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Sehubungan dengan itu dan demi pencapaian good governance, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur telah berupaya untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja ke arah terwujudnya lembaga yang baik dan dipercaya.

Laporan ini diharapkan menjadi sistem yang handal untuk memperbaiki proses-proses pengambilan keputusan mulai dari perumusan kebijakan strategis, perencanaan kinerja tahunan, pengukuran kinerja, laporan akuntabilitas kinerja, serta evaluasi dan tindak lanjut atas evaluasi, berupa perbaikan atau pemecahan atas masalah yang dihadapi secara berkelanjutan

Pengukuran capaian kinerja triwulan 4 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian Sekretaris sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Aksi yang telah disepakati bersama.

Untuk memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi. Secara ringkas capaian kinerja Sasaran Sekretaris, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 3

Pengukuran Capaian Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Sekretaris Triwulan IV Tahun 2025

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Triwulan 4		
			Target	Realisasi	Capaian
I	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	77,77%	97,22%
1.	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100%	100%	100%
2.	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	100%	100%
3.	Terlaksananya administrasi dan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100%	100%	100%
4.	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%
5.	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%
6.	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase BMD perangkat daerah penunjang yang terpenuhi	100%	77,77%	77,77%
7.	Tersedianya jasa pendukung dan sarana penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%
8.	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah siap pakai	Persentase barang milik daerah penunjang pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian terhadap realisasi kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota

Sasaran program adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai. Indikator kinerja yaitu persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota. Target yang ditetapkan untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota untuk triwulan 4 Tahun 2025 adalah sebesar 100% terealisasi sebesar 77,77%. Secara keseluruhan selama satu tahun capaian kinerja 97,22%.

Formulasi program :

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah keseluruhan capaian kinerja kegiatan } \mathbf{dibagi} \text{ jumlah seluruh kegiatan X} \\ & 100 \text{ (Tw-n)} \\ & = (100\%+100\%+100\%+100\%+100\%+77,77\%+100\%+100\%) / \mathbf{8 \text{ Kegiatan}} \\ & \quad \mathbf{x 100\%} \\ & = 97,22\% \end{aligned}$$

Program ini didukung 8 kegiatan, sebagai berikut :

1.1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu. Indikator kinerja untuk mengukur sasaran kegiatan adalah Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu. Triwulan 4 Tahun 2025, terealisasi 100% penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu dari target 100%, yang meliputi 4 laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu. Kegiatan

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu} \\ & \mathbf{dibagi} \text{ Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi X } 100\% \text{ (Tw-n)} \\ & = 4 \text{ Dokumen} / 4 \text{ Dokumen X } 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan menggunakan formula sebagai berikut;

1.2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan adalah tersedianya laporan keuangan perangkat daerah. Indikator kinerja untuk mengukur sasaran kegiatan adalah Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik. Pada triwulan 3 tahun 2025, terealisasi 100% dari target 100%. Capaian kinerja 100%. Adapun dokumen laporan keuangan yang diterbitkan dan disusun yaitu laporan keuangan bulanan meliputi laporan keuangan bulan Juli, Agustus, September, laporan keuangan triwulan dan laporan keuangan tahun 2025

Formula menghitung capaian kinerja adalah

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah dokumen laporan keuangan yang diterbitkan dibagi Jumlah dokumen} \\ & \text{laporan keuangan yang disusun} \times 100\% \text{ (Tw-n)} \\ & = 4 \text{ dokumen} / 4 \text{ dokumen} \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

1.3. Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan adalah terlaksananya administrasi dan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah. Indikator kinerja untuk mengukur sasaran kegiatan adalah persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar. Pada triwulan 3 tahun 2025, terealisasi 100% BMD yang diadministrasikan sesuai standar dari target 100%. Capaian kinerja 100%.

Formula menghitung capaian kinerja adalah

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang} \\ & \text{disusun} \text{ **dibagi** Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah} \\ & \text{pada SKPD (Tw-n)} \\ & = 1 \text{ laporan} / 1 \text{ laporan} \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

1.4. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan adalah terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah. Indikator kinerja untuk mengukur sasaran kegiatan adalah Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah. Terealisasi 100% rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah dari target 100%.

Formula menghitung capaian kinerja adalah

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan administrasi kepegawaian perangkat} \\ & \text{daerah } \mathbf{dibagi} \text{ jumlah seluruh sub kegiatan administrasi umum perangkat daerah X} \\ & 100\% \text{ (Tw-n)} \\ & = (100\% + 100\%) / 2 \text{ Sub Kegiatan x } 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

1.5. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan adalah terlaksananya administrasi umum perangkat daerah. Indikator kinerja untuk mengukur sasaran kegiatan adalah Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah. Terealisasi 100% kinerja administrasi umum perangkat daerah dari target 100%. Capaian kinerja 100%. Capaian terhadap realisasi kinerja ini diukur berdasarkan capaian kinerja 7 sub kegiatan yang ditargetkan pada triwulan 3.

Formula menghitung capaian kinerja adalah

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan administrasi umum perangkat daerah } \mathbf{dibagi} \\ & \text{jumlah seluruh sub kegiatan administrasi umum perangkat daerah } 100\% \text{ (Tw-n)} \\ & = (100\%+100\%+100\%+100\%+100\%+100\%+100\%) / 7 \text{ Sub Kegiatan X } 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

1.6. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Umum

Sasaran kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. Indikator kinerja untuk mengukur sasaran kegiatan adalah Persentase BMD perangkat daerah penunjang yang terpenuhi. Terealisasi 77,77% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan dari terget kinerja 100%. Capaian terhadap realisasi

kinerja di ukur berdasarkan capaian kinerja 3 sub kegiatan yang ditargetkan pada triwulan 4.

Formula menghitung capaian kinerja adalah :

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan pada kegiatan pengadaan} \\ & \text{barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah } \mathbf{dibagi} \text{ Jumlah} \\ & \text{seluruh sub kegiatan pada kegiatan pengadaan barang milik daerah} \\ & \text{penunjang urusan pemerintahan daerah } \times 100\% \text{ (Tw-n)} \\ & = 0\% / 3 \text{ Sub Kegiatan} \times 100\% \end{aligned}$$

1.7. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran kegiatan adalah Tersedianya jasa pendukung dan sarana penunjang urusan pemerintahan daerah. Indikator kinerja untuk mengukur sasaran kegiatan adalah Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah. Terealisasi 100% rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dari target 100%. Capaian kinerja 100%. Untuk mengukur capaian kinerja kegiatan ini, yaitu berasal dari capaian kinerja sub kegiatan pada triwulan 4 yang terdiri dari 3 sub kegiatan meliputi : capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat yaitu 100%; capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yaitu 100%; capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yaitu 100%.

Formula menghitung capaian kinerja adalah

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan} \\ & \text{pemerintahan daerah } \mathbf{dibagi} \text{ jumlah seluruh sub kegiatan penyediaan jasa} \\ & \text{penunjang urusan pemerintahan daerah } \times 100\% \text{ (Tw-n)} \\ & = (100\%+100\%+100\%) / 3 \text{ Sub Kegiatan} \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

1.8. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran kegiatan adalah tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah siap pakai. Indikator kinerja untuk mengukur sasaran kegiatan adalah Persentase barang milik daerah penunjang pemerintahan yang terpelihara dengan baik. Terealisasi 100% barang milik daerah yang terpelihara

dengan baik dari target 100%. Capaian kinerja 100%. Capaian kinerja kegiatan ini berasal dari capaian kinerja sub kegiatan yang ditargetkan kinerjanya pada triwulan 4 berdasarkan rencana aksi meliputi : Capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yaitu 100%; capaian kinerja sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yaitu 100%. Terealisasi 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 1 Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Gedung Kantor Kesbangpol)

Formula menghitung capaian kinerja adalah:

Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah **dibagi** jumlah seluruh sub kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah X 100% (Tw-n)

$$= (100\%+100\%) / 2 \text{ Sub Kegiatan} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

B. Realisasi Anggaran

Capaian realisasi anggaran triwulan 4 tahun 2025, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 3,610,971,297,- atau 95 % dari pagu anggaran yaitu Rp. 3,789,876,609,-

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	3.789.876.609	3.789.876.609	Rp3,610,971,297	95	178,905,312	5
1.	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	67,975,803	67,975,803	61,281,024	90	6,694,774	10
1.	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	36,802,500	36,802,500	34,428,124	94	2,374,376	6
2.	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	3.118.000	3.118.000	2,950,00	95	168,00	5
3.	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	2.637.500.	2.637.500.	2,534,500	96	103,000	4
4.	Evaluasi kinerja perangkat daerah	25,417,803	25,417,803	21,368,400	60,37	7,903,153	39,63
2.	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	2,116,351,066	2,116,351,066	2,041,937,340	96,5	74,413,726	3,5
1.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2,067,704,566	2,067,704,566	1,999,487,640	96,7	68,216,926	3,3
2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan	48,646,500	48,646,500	42,449,700	87,3	6,196,800	12,7

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
	bulanan/triwulan/semesteran SKPD						
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13,054,000	13,054,0000	11,510,630	88,2	1,543,370	11,8
1.	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	13,054,000	13,054,0000	11,510,630	88,2	1,543,370	11,8
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67,783,000	67,783,000	56,238,937	83	11,544,063	17
1.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	35,257,000	35,257,000	31,555,888	89,5	3,701,112	10,9
2.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	32,526,000	32,526,000	24,683,049	75,9	7,842,951	24,1
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	545,911,740	545,911,740	526,794,840	96,5	19,116,900	3,5
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	20.270.000	20,270,000	20,270,000	100	-	-
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	188.000.000	188.000.000	185,607,000	98,7	98,7	1,3
3.	Penyediaan bahan logistik kantor	14,289,340	14,289,340	14,289,140	100	200	-
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13,390,000	13,390,000	13,037,260	97,4	352,740	3
5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8,040,000	8,040,000	8,040,00	100	-	-
6.	Fasilitasi kunjungan tamu	16,500,000	16,500,000	14,460,000	87,6	2,040,000	12,4
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	285,422,400	285,422,400	271,090,740	95	14,331,660	5
6.	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	761,061,000	761,061,000	699,507,320	91,9	61,553,680	8,1
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	638,196,000	638,196,000	583,159,000	91,4	55,037,000	8,6
2	Pengadaan Mebel	103,865,000	103,865,000	97,471,320	94	4,006,000	6
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.000.000	19.000.000	11,877,000	62,5	123.000	37,5
4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-
7.	Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	96,770,000	96,770,000	94,413,821	97,6	2,356,179	2,4
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	1.610.000	1.610.000	1,549,254	96,2	60,746	3,8
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	33,600,000	33,600,000	32,954,567	98,1	645,433	1,9
3.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	61.560.000	61.560.000	59,910,000	97,3	1,650,000	2,7
8.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	120,970,000	120,970,000	119,287,385	98,6	1,682,615	1,4

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	24.000.000	24.000.000	23,523,585	98	476,415	2
2.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	37,970,000	37,970,000	36,954,800	97,3	1,015,200	2,7
3.	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	46,000,000	46,000,000	45,893,000	99,8	107,000	0,2
4.	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13,000,000	13,000,000	12,916,000	99,4	84,000	6
TOTAL BELANJA		3.789.876.609	3.789.876.609	Rp3,610,971,297	95	178,905,312	5

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja diharuskan bagi setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Secara garis besar, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran kinerja Triwulan 4 Tahun 2025 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Realisasi kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten / kota triwulan 4 tahun 2025 yaitu 95%
2. Realisasi anggaran sebesar 95% atau Rp. 1.835.714.774,-
3. Berdasarkan hasil realisasi kinerja dan realisasi anggaran menunjukkan hal yang positif. Capaian kinerja dan anggaran tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan adanya efisiensi anggaran.



LAPORAN KINERJA TRIWULAN – 4 SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang atas karunia dan kekuasaannya kami dapat menyajikan Laporan Kinerja Triwulan 3 pada sub bagian perencanaan dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur. Laporan ini menyajikan uraian penjelasan tentang capaian sasaran sub kegiatan yang telah kami laksanakan dan disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban secara nyata terhadap pencapaian kinerja.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan 3 Tahun Anggaran 2025. Disamping sebagai bentuk pertanggungjawaban, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta sebagai bahan untuk koreksi kegiatan yang tercantum pada rencana strategis selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan 4 Tahun 2025 ini masih banyak kelemahan dan jauh dari sempurna sehingga kami perlu saran dan koreksi dari semua pihak. Namun demikian besar harapan kami kiranya laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan dan pertimbangan lebih lanjut dari pimpinan.

Malili, 02 Januari 2026

Kasubag. Perencanaan dan Keuangan



HERMAWATI, SE

Pangkat: Penata Tk. I

NIP. 19831018 201001 2 018

BAB I**PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing Instansi.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan sasaran yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan, dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Penyusunan Laporan Kinerja mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

Maksud

- a. Memberikan informasi dan pertanggungjawaban kinerja yang terukur secara tertulis kepada Atasan Langsung atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Sub Bagian Perencanaan dan keuangan

- b. Memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja dalam rangka mewujudkan Laporan Kinerja tujuan dan sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- c. Sebagai sarana informasi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip good governance. Sebagai salah satu bahan penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah:

- a. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.
- b. Melakukan perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja instansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.
- c. Menerapkan fungsi manajemen kinerja yang baik dan benar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.
- d. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB II**PERENCANAAN KINERJA****PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian kinerja berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen karena akan menentukan keberhasilan kegiatan yang telah direncanakan. Rencana Strategis menjadi tuntunan dan petunjuk yang memberi arah tujuan dan sasaran pada kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.

Perjanjian Kinerja berisi perjanjian dalam hal ini Kasubag perencanaan dan Keuangan kepada atasan langsung dalam hal ini Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mewujudkan target kinerja tahun berjalan.

Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi dari rencana strategis Tahun 2021 – 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatan. Target ini dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2025.

Adapun Penetapan/Perjanjian Kinerja Kasubag Perencanaan dan keuangan Tahun 2025 sebagaimana Tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen
2.	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan RKA-SKPD	2 Dokumen
3.	Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen
4.	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Laporan
5.	Tersediannya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	24 Orang/Bulan
6.	tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	18 Dokumen

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA****3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat suatu program/kegiatan/sub kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dari organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi Kabupaten Luwu Timur.

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Sehubungan dengan itu dan demi pencapaian good governance, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur telah berupaya untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja ke arah terwujudnya lembaga yang baik dan dipercaya.

Laporan ini diharapkan menjadi sistem yang handal untuk memperbaiki proses-proses pengambilan keputusan mulai dari perumusan kebijakan strategis, perencanaan kinerja tahunan, pengukuran kinerja, laporan akuntabilitas kinerja, serta evaluasi dan tindak lanjut atas evaluasi, berupa perbaikan atau pemecahan atas masalah yang dihadapi secara berkelanjutan

Pengukuran capaian kinerja triwulan 4 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Aksi yang telah disepakati bersama.

Untuk memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi. Secara ringkas capaian

kinerja Sasaran Sub Bagian perencanaan dan keuangan, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 3.1

Pengukuran Capaian Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Perubahan
Sub Bagian perencanaan dan keuangan Triwulan 4 Tahun 2025

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Triwulan - 4		
			Target	Realisasi	Capaian %
1.	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
2.	Tersedianya dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
3.	Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	0%
3.	Tersedianya laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	2 Laporan	2 Laporan	100%
4.	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	24 Org/Bln	24 Org/Bln	100%
5.	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran dan akhir tahun dengan baik	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100%

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian terhadap realisasi kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sub Kegiatan

No	Uraian	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4
1.	Target	0 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen
2.	Realisasi	0 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen
3.	Capaian	0%	100%	100%	0%

Sasaran kinerja sub kegiatan yaitu tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah. Pada triwulan 4 kinerja sub kegiatan ini tidak ditargetkan

Formula mengukur capaian kinerja sub kegiatan ini yaitu :

Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (Tw-n)

Target Tw.4 = 0 Dokumen ; Realisasi Tw.4 = 0 Dokumen

2. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA

Tabel 3.3
Capaian Kinerja

No	Uraian	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4
1.	Target	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen
2.	Realisasi	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen
3.	Capaian	0%	100%	100%	0%

Sasaran kinerja sub kegiatan yaitu tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan RKA-SKPD. Pada triwulan 4 kinerja sub kegiatan ini tidak ditargetkan

Formula mengukur capaian kinerja sub kegiatan ini yaitu :

Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (Tw-n)

Target Tw.4 = 0 Dokumen; Realisasi Tw.4 = 0 Dokumen

3. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA

Tabel 3.3
Capaian Kinerja

No	Uraian	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4
1.	Target	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen
2.	Realisasi	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen
3.	Capaian	100%	0%	0%	100%

Sasaran kinerja sub kegiatan yaitu tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan DPA-SKPD. Pada triwulan 4 ditargetkan 1 dokumen DPA yang tersedia, terealisasi 1 dokumen DPA yaitu Dokumen DPPA Tahun 2025 dengan capaian kinerja 100%.

Formula mengukur capaian kinerja sub kegiatan ini yaitu :

Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (Tw-n)
Target Tw.4 = 1 Dokumen; Realisasi Tw.4 = 1 Dokumen

4. Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 3.4
Capaian Kinerja

No	Uraian	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4
1.	Target	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
2.	Realisasi	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
3.	Capaian	100%	100%	100%	100%

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu. Pada triwulan 4 ditargetkan 2 dokumen, dan terealisasi 2 dokumen yaitu : 1 Laporan Evaluasi RKPD Triwulan 3 Tahun 2025; dan 1 Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan 3 Tahun 2025. Dengan capaian kinerja 100%

Formula mengukur capaian kinerja sub kegiatan ini yaitu :

Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu (Tw-n)
Target Tw.4 = 2 Laporan; Realisasi Tw.4 = 2 Laporan

5. Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tabel 3.5
Capaian Kinerja

No	Uraian	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4
1.	Target	17 Orang/Bln	17 Orang/Bln	17 Orang/Bln	24 Orang/Bln
2.	Realisasi	17 Orang/Bln	17 Orang/Bln	17 Orang/Bln	24 Orang/Bln
3.	Capaian	100%	100%	100%	100%

Sasaran sub kegiatan yaitu tersedianya gaji dan tunjangan ASN. Pada triwulan 4 ditargetkan 24 orang/bulan ASN yang menerima gaji dan tunjangan, terealisasi 24 orang ASN. Capaian kinerja 100%.

Formula mengukur capaian kinerja sub kegiatan ini yaitu :

Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Tw-n)
Target Tw.4 = 24 Org/Bln; Realisasi Tw.4 = 24 Org/Bln

6. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran

Tabel 3.6
Capaian Kinerja

No	Uraian	Tw-1	Tw-2	Tw-3	Tw-4
1.	Target	5 laporan	4 laporan	5 laporan	4 laporan
2.	Realisasi	5 laporan	4 laporan	5 laporan	4 laporan
3.	Capaian	100%	100%	100%	100%

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD. Pada triwulan 4 ditargetkan 4 Laporan dan terealisasi 4 Laporan atau capaian kinerja 100%. Adapun laporan tersebut yaitu 3 laporan keuangan bulanan; dan 1 laporan triwulan. Capaian kinerja 100%

Formula mengukur capaian kinerja sub kegiatan ini yaitu :

Jumlah jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu (tw-n)

Target Tw.4 = 4 Laporan; Realisasi Tw.4 = 4 Laporan

3.2. REALISASI ANGGARAN

Capaian realisasi keuangan sampai dengan triwulan 4 tahun 2025, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebesar Rp. **2,103,218,364** atau 96.29%. Berikut tabel capaian realisasi anggaran sampai dengan triwulan 4 tahun 2025.

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Triwulan-4
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

NO	PROGRAM /KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	2,184,326,869	2,184,326,869	2,103,218,364	96.29	81,108,505	3.71	
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67,975,803	67,975,803	61,281,024	90.15	6,694,779	9.85	

NO	PROGRAM /KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
1.	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	36,802,500	36,802,500	34,428,124	93.55	2,374,376	6.45	Realisasi anggaran sebesar Rp34.428.124 atau 93,55% dari pagu Rp36.802.500, dengan sisa anggaran Rp2.374.236 berasal dari efisiensi belanja e-catalog dan perjalanan dinas.
2.	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	3,118,000	3,118,000	2,950,000	94.61	168,000	5.39	Realisasi anggaran sebesar Rp 2.950.000 atau 94,61% dari pagu Rp 3.118.000, dengan sisa anggaran Rp. 168.000 berasal dari efisiensi belanja e-catalog
3.	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	2,637,500	2,637,500	2,534,500	96.09	103,000	3.91	Realisasi anggaran sebesar Rp 2.534.500 atau 96,09% dari pagu Rp 2.637.500, dengan sisa anggaran Rp. 103.000 berasal dari efisiensi belanja e-catalog
4.	Evaluasi kinerja perangkat daerah	25,417,803	25,417,803	21,368,400	84.07	4,049,403	15.93	Realisasi anggaran sebesar Rp 21.368.400 atau 84,07% dari pagu Rp. 25.417.803, dengan sisa anggaran Rp. 4.049.403 berasal dari efisiensi belanja e-catalog dan perjalanan dinas.
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,116,351,066	2,116,351,066	2,041,937,340	96.48	74,413,726	3.52	
1.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2,067,704,566	2,067,704,566	1,999,487,640	96.70	68,216,926	3.30	Realisasi anggaran sebesar Rp1.999.487.640 atau 96,70% dari pagu Rp2.067.704.566, dengan sisa anggaran Rp. 68.216.926 berasal dari mutasi dan promosi pegawai ke instansi lain serta penyesuaian data kepegawaian
2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/triwulan/semesteran SKPD	48,646,500	48,646,500	42,449,700	87.26	6,196,800	12.74	Realisasi anggaran sebesar Rp 42.449.700 atau 87,26% dari pagu Rp. 48.646.500, dengan sisa anggaran Rp. 6.196.800 berasal dari efisiensi belanja e-catalog dan perjalanan dinas.

BAB IV**PENUTUP****A. KESIMPULAN**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Secara garis besar, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran kinerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Triwulan 4 Tahun 2025 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Secara umum hasil analisis pencapaian indicator kinerja sub bagian perencanaan dan keuangan mencapai target yang ditetapkan;
2. Realisasi anggaran sub bagian perencanaan dan keuangan berdasarkan pagu anggaran kas triwulan 4 tahun 2025 yaitu Rp 2,184,326,869 terealisasi sebesar Rp. 2,103,218,364 atau 96,29%

LAPORAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN IV



BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN
KEBANGSAAN, KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA
TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza Wa Jallah karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga laporan pelaksanaan program dan kegiatan pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Triwulan IV Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam laporan pelaksanaan kegiatan ini menyajikan laporan kinerja dan laporan keuangan berdasarkan kondisi obyektif hasil-hasil yang dicapai. Laporan ini memaparkan tentang maksud dan tujuan serta permasalahan dan harapan dari kegiatan ini.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini belum sepenuhnya sempurna atau masih banyak kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dimasa akan datang.

Malili, 31 Desember 2025
Kepala Bidang Ideologi, Wawasan
Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Agama,



I DEWA PUTU ALIT S, S.Sos., M.Si

Pangkat/Gol : Pembina / IVa

Nip. 197507192006041019

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I. PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Maksud dan Tujuan.....	4
BAB II PERJANJIAN KINERJA.....	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	7
A. Akuntabilitas kinerja Tahun 2025.....	7
B. Realisasi Keuangan.....	14
BAB IV PENUTUP.....	16
A. Kesimpulan.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan hubungan kerja dan bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Dinas terkait di Provinsi yang membidangi bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, Politik Dalam Negeri dan Ormas serta Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Keberhasilan atau kegagalan akan terlihat dari pertanggungjawaban yang dilakukannya, selama ini pengukuran kinerja lebih ditekankan pada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran terlepas dari manfaat, keuntungan dan dampak yang ditimbulkan.

Laporan kinerja triwulan ke - IV Tahun 2025 pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama ini merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) sesuai

dengan target yang telah diperjanjikan oleh masing-masing pejabat struktural. Melalui laporan ini akan tergambar hal-hal yang sudah tercapai dan belum tercapai serta permasalahan yang dihadapi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakan penyusunan laporan ini adalah :

1. Memberikan gambaran akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) sesuai dengan target yang telah diperjanjikan oleh masing-masing pejabat struktural.
2. Memberikan data informasi dalam penyusunan laporan kinerja Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
3. Menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan yakni pada triwulan IV Tahun 2025.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan / perjanjian yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dengan adanya perjanjian kinerja diharapkan dalam mengelola program atau kegiatan akan lebih baik dan terarah. Perjanjian Kinerja Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Tahun 2025 memperjanjikan 2 (dua) Program yang meliputi 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Perjanjian Kinerja Perubahan Eselon III Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama Tahun 2025

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
I.	Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100%
1.	Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100%
1.1.	Terlaksananya koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan , bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter kebangsaan, pembauran kebangsaan, bhineka Tunggal ika dan Sejarah kebangsaan	30 Orang
1.2	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah paskibraka	70 Orang
2.	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan	100%

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
2.1.	Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase capaian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%
2.1.1.	Terlaksananya koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan budaya serta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika dan kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	575 Orang

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu program / kegiatan / sub kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dari organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi Kabupaten Luwu Timur.

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Sehubungan dengan itu dan demi pencapaian good governance, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur telah berupaya untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja ke arah terwujudnya lembaga yang baik dan dipercaya.

Laporan ini diharapkan menjadi sistem yang handal untuk memperbaiki proses-proses pengambilan keputusan mulai dari perumusan kebijakan strategis, perencanaan kinerja tahunan, pengukuran kinerja, laporan akuntabilitas kinerja, serta evaluasi dan tindak lanjut atas evaluasi, berupa perbaikan atau pemecahan atas masalah yang dihadapi secara berkelanjutan

Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap target perjanjian kinerja tahun 2025 yang telah disepakati antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu.

Berdasarkan evaluasi atas rencana aksi kinerja dan anggaran pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Penguatan ideologi pancasila dan Karakter kebangsaan adalah suatu pandangan hidup atau sistem nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara dan menjadi tatanan yang mendasari kebudayaan masyarakat serta mencerminkan kepribadian masyarakat itu sendiri.

Sasaran program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan adalah meningkatnya penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan dengan indikator program yaitu persentase penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan. Dimana Target kinerja pada triwulan IV sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%, dengan formula indikatornya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah peserta yang meningkat pemahamannya dibagi jumlah peserta yang disasar} \\ & (Tw-n) \times 100\% \\ & = 30/30 \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

Adapun capaian program tersebut diperoleh sesuai dengan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan dimana untuk triwulan IV ditargetkan sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan telah terlaksana, yaitu pelaksanaan kegiatan rapat kerja bela negara dengan jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

Dalam Pelaksanaannya Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yakni :

1.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Dengan indikator kinerja yaitu "Persentase pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Pada Triwulan IV, ditargetkan 100% dan terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100%. Capaian tersebut diperoleh dari pelaksanaan kegiatan pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan yakni pelaksanaan rapat kerja bela negara dan peringatan hari bela negara, Adapun formulasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah kegiatan yang terlaksana (Tw-n) dibagi jumlah kegiatan yang} \\ & \text{direncanakan (Tw-n) x 100\%} \\ & = 1/1 \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

1.1.1. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Sasaran kinerja sub kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan. Ditargetkan sebanyak 30 Orang dan terealisasi sebanyak 30 orang pada triwulan IV dengan pelaksanaan rapat kerja bela negara, sehingga capaian kinerja untuk triwulan IV sebesar 100%.

Pelaksanaan Rapat Kerja Bela Negara :



Adapun formula untuk mengukur indikator ini adalah :

Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter kebangsaan, pembauran kebangsaan, bhineka Tunggal ika dan Sejarah kebangsaan (Tw-n)

1.1.2. Sub Kegiatan : Pembentukan PASKIBRAKA

Sasaran kinerja sub kegiatan ini adalah terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka. Dengan indikator kinerja yaitu jumlah paskibraka (orang).

Berdasarkan rencana aksi yang telah ditetapkan target kinerja untuk sub kegiatan ini telah tercapai pada triwulan III yakni terbentuknya

pasukan pengibar bendera pusaka sebanyak 70 (tujuh puluh) orang, sehingga pada triwulan IV sudah tidak ada target yang ingin dicapai.

Adapun formula untuk mengukur indikator ini adalah :

Jumlah paskibraka (Tw-n)

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Sasaran kinerja program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yaitu meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. Dengan indikator persentase kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, social dan budaya yang dilaksanakan. Target kinerja pada triwulan IV sebesar 100% dan terealisasi 100% dengan capaian kinerjanya sebesar 100%, Adapun formula indikatornya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah kebijakan yang dilaksanakan dibagi jumlah kebijakan yang ditargetkan} \\ & (tw-n) \times 100\% \\ & = 2/2 \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Dalam pelaksanaannya Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut :

2.1. Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pementapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

Indikator kegiatan yaitu Persentase capaian pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. Target kinerja yaitu 100%, terealisasi 100%. Adapun formula indikatornya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah kegiatan yang terlaksana dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan (Tw-} \\ & \text{n) } \times 100\% \\ & = 1/1 \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

2.1.1. Sub Kegiatan : Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama, fasilitasi penghayat kepercayaan di daerah

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi

pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah.

Berdasarkan rencana aksi yang ditetapkan, pada triwulan IV tahun 2025 ditargetkan sebanyak 300 (tiga ratus) orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, dan terealisasi hanya 250 orang disebabkan ada satu kegiatan yang tidak terlaksana yakni kegiatan pertemuan tim terpadu P4GN, adapun formula untuk mengukur indikator sub kegiatan ini adalah :

Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah (Tw-n)
Target = 300 orang Realisasi = 250 orang

Berikut kegiatan sosialisasi P4GN dan Evaluasi program kerja forum kerukunan umat Beragama (FKUB) :





B. REALISASI KEUANGAN

Capaian realisasi anggaran sampai pada triwulan IV tahun 2025, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama berdasarkan anggaran kas sampai pada triwulan IV sebesar Rp. 2,219,631,800,- terealisasi sebesar Rp. 2,111,523,531,- atau 95,13%. Berikut tabel capaian realisasi anggaran sampai pada triwulan IV tahun 2025.

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SD TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-10	-11
I	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1,642,396,800,-	1,642,396,800,-	1,561,725,081,-	95,09	80,671,719,-	4,91
1.	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	1,642,396,800,-	1,642,396,800,-	1,561,725,081,-	95,09	80,671,719,-	4,91
1.	Pelaksanaan koordinasi dibidang wawasan kebangsaan , bela negara, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	31,148,800,-	31,148,800,-	23,647,550,-	75,92	7,501,250,-	24,08
2.	Pembentukan Paskibraka	1,611,248,000,-	1,611,248,000,-	1,538,077,531,-	95,46	73,170,469,-	4,54
II	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	577,235,000,-	577,235,000,-	549,798,450,-	95,25	27,436,550,-	0,63
1.	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	577,235,000,-	577,235,000,-	549,798,450,-	95,25	27,436,550,-	0,63

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SD TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1.	Pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	577,235,000,-	577,235,000,-	549,798,450,-	95,25	27,436,550,-	0,63
TOTAL BELANJA		2,219,631,800,-	2,219,631,800,-	2,111,523,531,-	95,13	108,108,269,-	4,87

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan target anggaran sampai pada triwulan IV terealisasi sebesar 2,111,523,531,- atau sekitar 95,13%, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada sub kegiatan Pelaksanaan koordinasi dibidang wawasan kebangsaan bela negara, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan capaian realisasi keuangan hanya sebesar 75,92% dikarenakan kegiatan peringatan hari bela negara dilakukan secara sederhana sehingga anggaran belanja cetak spanduk dan sewa sound system tidak terealisasi.
2. Pada sub kegiatan Pembentukan Paskibraka, realisasi keuangan Rp. 1,538,077,531,- atau 95,46% dari target anggaran triwulan IV sebesar Rp. 1,611,248,000,- terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 73,170,469,- disebabkan sisa penawaran beberapa pembelanjaan e-catalog dan beberapa belanja yang sifatnya disediakan seperti perjalanan dinas, sewa kendaraan bermotor penumpang dan sewa hotel.

Pada sub kegiatan pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah, realisasi keuangan sebesar Rp. 549,798,450,- atau sekitar 95,25% dari target anggaran pada triwulan IV sebesar Rp. 577,235,000,-, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 27,436,550,- ini disebabkan sisa penawaran dari beberapa pembelanjaan e-catalog dan beberapa belanja yang tidak terlaksana dan belanja yang sifatnya disediakan seperti perjalanan dinas dan sewa kendaraan bermotor penumpang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja diharuskan bagi setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Secara garis besar, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran kinerja Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Triwulan IV Tahun 2025 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan terealisasi sebesar 100% pada triwulan IV;
2. Capaian indikator kinerja Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya terealisasi sebesar 100% pada triwulan IV;
3. Dari sisi pencapaian akuntabilitas keuangan, tingkat capaian realisasi keuangan bidang Ideologi, Wasbang dan Ketahanan Ekonomi, sosial, budaya dan agama pada triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp. 2,111,523,531,- atau 95,13% berdasarkan anggaran kas dan anggaran tahunan.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Soekarno – Hatta, Desa Puncak Indah
M A L I L I, 92981

Malili, 29 Desember 2025

Nomor : 200.1.2.4 / 540 / Bakesbangpol
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth. Para Staf Bidang Ideologi, Wasbang, Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Agama
Masing - masing
di-
Tempat

Sehubungan dengan telah berakhirnya Pelaksanaan RKPD pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025, maka dengan ini saudara diundang untuk rapat evaluasi yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 30 Desember 2025
Pukul : 09.30 Wita - Selesai
Tempat : Ruang Kerja Bidang Ideologi dan Wasbang

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan
Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Agama

I DEWA PUTU ALIT S.S.Sos.,M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19750719 200604 1 019



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Malili 92981

email : kesbangterpadu@gmail.com

NOTULEN

- Rapat : Evaluasi Internal Triwulan IV
Hari / Tanggal : Selasa, 30 Desember 2025
Waktu : Pukul 09.30 Wita – Selesai
Tempat : Ruang Kerja Bidang Ideologi dan Wasbang
Pimpinan Rapat : Kepala Bidang Ideologi, Wasbang dan Ketahanan Ekonomi, Sosial & Budaya
- Peserta Rapat : 1. Kepala Bidang Ideologi, Wasbang dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
2. Para Staf Bidang Ideologi, Wasbang dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
- Pembahasan : 1. Senantiasa Memanjatkan puji & syukur kehadirat Allah Azza Wa Jallah.
2. Menjaga kedisiplinan dan kebersihan setiap hari kerja.
3. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait data - data di bidang ideologi, wasbang, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.
4. Melakukan pengecekan terhadap program/kegiatan dan sub kegiatan terkait realisasi anggaran dan realisasi kinerja serta memberikan penjelasan terkait anggaran yang masih tersisa dan kegiatan yang tidak dilaksanakan pada triwulan IV.
5. Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan untuk triwulan IV.

Demikian notulen rapat ini dibuat sebagai bahan seperlunya.

Pimpinan Rapat,

I DEWA PUTU ALIT, S.Sos., M.Si

NIP.197507119 200604 1 019

Notulis,

EKA SUCIAWATI MUIS

NIP. 198807072025212048

DOKUMENTASI
EVALUASI TRIWULAN IV
BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL BUDAYA DAN AGAMA





LAPORAN EVALUASI TRIWULAN-4

TAHUN
2025



BIDANG WASNAS DAN
PENANGANAN KONFLIK
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah
MALILI, 92981

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI
ATAS KINERJA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK
TRIWULAN 4 TAHUN 2025**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik (Jabatan Eselon III) atas pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya

Informasi yang dimuat dalam laporan Kinerja menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan

Berdasarkan hasil evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan

Malili, 05 Januari 2026

Yang melakukan evaluasi
Kepala Badan,

SALAM LATIEF, S.H., M.Si., CGCAE

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19690403 198903 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Malili 92981
email : kesbangpol.lutim@gmail.com

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI
ATAS KINERJA ANALIS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK
TRIWULAN 4 TAHUN 2025**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Analis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik atas pelaksanaan Sub Kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya

Informasi yang dimuat dalam laporan Kinerja menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan

Berdasarkan hasil evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan

Malili, 05 Januari 2026

Yang melakukan evaluasi
Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik

HELENA, S. Sos

Pangkat : Pembina

NIP. 19681010 200901 2 003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik Sosial Triwulan 4 Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Tidak lepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi penyusun bahasa maupun segi lainnya, yang sangat jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan waktu.

Akhir kata kami berharap semoga Laporan ini dapat bermanfaat dalam upaya untuk mewujudkan konsistensi kami dalam pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi secara berkala sehingga daerah Kabupaten Luwu Timur lebih baik di masa yang akan datang dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Malili, 05 Januari 2026

Kepala Bidang Kewaspadaan
Nasional dan Penangan Konflik



HELENA, S.Sos

Pangkat : Pembina

Nip 19681010 200901 2 003

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kabupaten Luwu Timur merupakan wilayah yang daerahnya terdiri dari bermacam-macam suku, ras, agama, dan budaya, kemajemukan itu kadang menimbulkan perbedaan yang bisa mengakibatkan perpecahan antar masyarakat oleh sebab itu untuk menghindari terciptanya konflik dalam masyarakat, baik itu agama, mau pun suku etnis dalam daerah maka dibutuhkan pendeteksi dini kewaspadaan nasional untuk mengatasi terjadinya konflik sosial. Kewaspadaan Nasional yaitu suatu kualitas kesiapsiagaan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia untuk mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kewaspadaan Nasional juga dapat diartikan sebagai sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan tanggungjawab seorang warga Negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari suatu ancaman. Membahas Kewaspadaan Nasional tidak terlepas dari hubungannya dengan para digmanasional. Paradigma Nasional adalah polanasional yang digunakan dalam menjalankan sistem kehidupan nasional. Paradigma tersebut meliputi Pancasila, UUD 1945, Ketahanan Nasional dan Wawasan Nusantara. Dalam Paradigma Nasional ditemukan paham kebangsaan, rasa kebangsaan, wawasan kebangsaan, jiwa dan semangat kebangsaan. Maka kewaspadaan nasional harus berawal dari keyakinan ideologis dan nasionalisme yang kokoh serta didukung oleh usaha-usaha pemantauan sejak dini dan terus menerus terhadap berbagai implikasi dari situasi serta kondisi yang berkembang baik didalam maupun di luar negeri.

Negara Indonesia merupakan fakta sosial merupakan bangsa yang multicultural dengan sisi positif dan negatifnya. Untuk menjamin keamanan, ketentraman dan ketertiban umum dan serta kesejahteraan rakyat, dibutuhkan upaya upaya sinergis antar seluruh elemen bangsa. Terkait dengan hal itu, sangat penting upaya penguatan kewaspadaan

nasional yakni dengan meningkatkan fungsi deteksi dini dalam upaya pencegahan terhadap segala potensi ancaman. Kewaspadaan nasional yang dilandasi rasa nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan tanggungjawab seluruh komponen bangsa terhadap kelangsungan. Kehidupan berbangsa dan bernegara. Kewaspadaan nasional yang kuat dapat mendeteksi, mengantisipasi, dan mencegah berbagai bentuk potensi ancaman keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penguatan kewaspadaan nasional dapat dilakukan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penguatan fungsi koordinasi seluruh stakeholders;
2. Persamaan persepsi antar seluruh pemangku kepentingan;
3. Mengikis ego sektoral;
4. Memberdayakan dan meningkatkan peran lembaga budaya dan menghormati kearifan local dalam memperkuat kewaspadaan nasional dalam kehidupan masyarakat;
5. Mendorong pemberdayaan masyarakat melalui forum kemitraan pemerintah dengan mengikut sertakan Forkopimda, Polri, TNI, BIN, serta OPD terkait sebagai garda terdepan untuk menjaga kewaspadaan dini;
6. Menjaga iklim yang kondusif melalui peningkatan peran koordinasi pemerintah dan masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan Pengawasan Orang Asing dan Organisasi Asing secara umum mempunyai pengertian, Pengawasan terhadap Orang Asing yang masuk dan keluar, keberadaan serta kegiatannya di wilayah. Sehingga diperlukan instrument hukum dan kerjasama institusi yang kuat untuk pengawasan dan penegakan hukum yang dapat mengawasi Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Yang dimaksud dengan "orang asing" ialah orang bukan warga Negara Republik Indonesia. Ada 2 (dua) golongan Orang Asing di Indonesia yaitu: Orang Asing pendatang ialah mereka yang mendapat ijin masuk dengan memperoleh hak untuk tinggal di Indonesia dalam waktu tertentu yang dikenal dengan tenaga asing pemegang visa dan Orang Asing pen tetap ialah mereka yang diperbolehkan tinggal tetap di Indonesia dan diwajibkan memperoleh ijin menetap dengan memperoleh Surat

Keterangan Kependudukan (SKK) yang dikenal dengan tenaga asing atau tenaga asing domestik. Hukum keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan sub sistem dari hukum administrasi negara. Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional, maka pemerintah Indonesia telah menetapkan prinsip, tata pelayanan, tata pengawasan atas masuk dan keluar orang ke Indonesia.

2. Landasan Hukum

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 kewaspadaan dini di daerah, maka Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2013 tentang Koordinasi Intelegen daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Komunitas Intelgen Daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pemerintah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah

- f. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 30/1-01/I/Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Organisasi masyarakat Asing dan tenaga Kerja Asing di Kabupaten Luwu Timur
- g. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 94/1-01/III/Tahun 2025 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan dokumen perjanjian kinerja Tahun Anggaran 2025 yang ditandatangani bersama antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik untuk mencapai target kinerja sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja, maka diperjanjikan 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu :

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Perubahan Eselon III Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Tahun 2025

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100%
1.1.	Terlaksananya pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100%
1.1.1.	Terlaksananya koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjas ama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembagaasing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaanbidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjas ama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah	164 orang
1.1.2.	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjas ama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembagaasing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaanbidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjas ama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah	4 Laporan
1.1.3.	Terlaksananya forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota	4 Dokumen

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat suatu kegiatan/program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dari organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi Kabupaten Luwu Timur.

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Sehubungan dengan itu dan demi pencapaian good governance, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur telah berupaya untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja ke arah terwujudnya lembaga yang baik dan dipercaya.

Laporan ini diharapkan menjadi sistem yang handal untuk memperbaiki proses-proses pengambilan keputusan mulai dari perumusan kebijakan strategis, perencanaan kinerja tahunan, pengukuran kinerja, laporan akuntabilitas kinerja, serta evaluasi dan tindak lanjut atas evaluasi, berupa perbaikan atau pemecahan atas masalah yang dihadapi secara berkelanjutan

Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap target perjanjian kinerja tahun 2025 yang telah disepakati antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu.

Tabel. 3
Pengukuran Capaian Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja
Triwulan - 4

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Triwulan 3 Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan penanganan konflik sosial	Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan penanganan konflik sosial	100%	100%	100%
1.1.	Terlaksananya pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100%	100%	100%
1.1.1.	Terlaksananya koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	52 Orang	52 Orang	100%
1.1.2.	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%
1.1.3.	Terlaksananya forum koordinasi pimpinan daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi pimpinan kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian terhadap realisasi kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Indikator kinerja program adalah Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial. Pada triwulan 4 ditargetkan 100%, dan terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.

Pencapaian indikator program ini diukur dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah kejadian dan konflik yang terselesaikan (Tw-n) } \mathbf{dibagi} \text{ jumlah kejadian} \\ & \text{dan konflik yang terdata (Tw-n) } \mathbf{x 100\%} \\ & = 20/20 \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

Berikut data kejadian dan konflik yang terdata dan tertangani pada periode bulan juli sampai dengan september 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.
Data Kejadian dan Konflik
Periode Oktober - Desember 2025

No	Jenis Kejadian	Tanggal	Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian	Kerugian			Tidak lanjut/ Solusi
						Materi al	Korban Jiwa	Korban Luka	
1	Korban Meninggal Dunia	01 Oktober 2025	Lampainai	Wotu	Korban meninggal dunia akibat meminum racun atas nama Kardi	-	1 Orang	-	Jenasah telah diserahkan pada keluarga untuk dimakamkan
2	Kebakaran Hutan	02 Oktober 2025	Puncak Indah	Malili	Peristiwa kebakaran hutan yang terjadi di Desa Puncak Indah	-	-	-	Api telah dipadamkan oleh personal Pemadam Kebakaran

LAPORAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN 4 - 2025

No	Jenis Kejadian	Tanggal	Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian	Kerugian			Tidak lanjut/ Solusi
						Materi al	Korban Jiwa	Korban Luka	
3	Aksi Unjuk Rasa	07 Oktober 2025	Puncak Indah	Malili	Aksi unjuk rasa oleh Aliansi Forum Komunikasi Masyarakat Kilo-kilo (FKMKK) terkait pemberdayaan tenaga kerja lokal	-	-	-	Telah dilakukan mediasi dan dilakukan pertemuan di Kantor Camat Malili
4	Pengrusakan Rumah	07 Oktober 2025	Lewonu	Burau	Aksi pengrusakan rumah di Desa Lewonu Kecamatan Burau	5.000.000	-	-	Kejadian sudah ditangani pemerintah setempat dan Polsek Burau
5	Kebakaran Lahan	13 Oktober 2025	Timampu	Towuti	Kebakaran lahan di Dusun Bakara Desa Timampu	-	-	-	Api telah dipadamkan oleh personal pemadam kebakaran
6	Pencurian	17 Oktober 2025	Margomulyo	Tomoni Timur	Aksi pencurian tabung gas elpiji 3 kg di Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur atas nama korban Rahmiati	16.500.000	-	-	Kejadian sudah dilaporkan di Polsek Tomoni Timur dan pelaku telah tertangkap
7	Aksi Unjuk Rasa (Demo)	20 Oktober 2025	Puncak Indah	Malili	Aksi unjuk rasa oleh Aliansi Masyarakat Luwu Timur di Kantor DPRD terkait tuntutan permasalahan lahan Perkebunan sawit di Desa Kasintuwu	-	-	-	Telah dilakukan mediasi dan akan dilakukan pengawasan berdasarkan kesepakatan antara para aksi dan DPRD
8	Bencana Alam Kebakaran	03 November 2025	Cendana Hitam	Tomoni Timur	Bencana alam kebakaran rumah milik Kadek Naksa di Desa Cendana Hitam	150.000.000	-	-	Beberapa benda yang terbakar antara lain peralatan rumah tangga, alat elektronik, sertifikat rumah dan tanah beserta rumah
9	Bencana Alam Kebakaran	05 November 2025	Kertoraharjo	Tomoni Timur	Peristiwa kebakaran parkiran mobil milik Putu Rijasa di Desa Kertoraharjo akibat sisa sesajen	15.000.000	-	-	Api telah dipadamkan oleh personal Pemadam Kebakaran
10	Penganiayaan	10 November 2025	Non Blok	Kalaena	Penganiayaan terhadap Untung Amben oleh Semel di Desa Non Blok Kecamatan Kalaena	-	-	1 Orang	Telah ditangani oleh Pemerintah Desa dan selanjutnya dilaporkan pada Subsektor Kalaena

LAPORAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN 4 - 2025

No	Jenis Kejadian	Tanggal	Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian	Kerugian			Tidak lanjut/ Solusi
						Materi	Korban Jiwa	Korban Luka	
11	Pencurian	21 November 2025	Bayondo	Tomoni	Pencurian buah sawit milik PTPN Bayondo oleh Saparuddin	2.500.000	-	-	Telah dilaporkan pada pihak berwajib dan pelaku telah diamankan di Polsek Mangkutana
12	Penganiayaan	11 Desember 2025	Mulyasri	Tomoni	Penganiayaan menggunakan senjata tajam terhadap Jusriadi oleh Pelaku Ipan di Desa Mulyasri	-	-	1 Orang	Kejadian telah ditangani pihak Kepolisian dan korban sudah dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan pengobatan
13	Pencabulan	12 Desember 2025	Rante Mario	Tomoni	Pencabulan terhadap anak dibawah umur oleh pelaku Reyhan Rabir di Desa Rante Mario	-	-	-	Peristiwa telah dilaporkan pada Pemerintah setempat dan pelaku telah dilaporkan pada pihak berwajib
14	Pencabulan	12 Desember 2025	Kalaena	Wotu	Pencabulan terhadap anak dibawah umur oleh pelaku Tajuddin di Desa Kalaena	-	-	-	Peristiwa telah dilaporkan pada Pemerintah setempat dan pelaku telah dilaporkan pada pihak berwajib
15	Pencurian	15 Desember 2025	Mulyasri	Tomoni	Aksi pencurian unag Tabungan di Sekolah SDN 170 Mulyasri	1.000.000	-	-	Pihak Sekolah telah melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian
16	Aksi Unjuk Rasa (Demo)	25 Desember 2025	Kasintuwu	Mangkuratana	Aksi unjuk rasa oleh Sekelompok Masyarakat terhadap PT.SMS terkait aktivitas Perusahaan agar dihentikan	-	-	-	Telah dilakukan meiasi dan kesepakatan akan dilakukan pertemuan di Polsek Mangkutana
17	Korban Meninggal Dunia	25 Desember 202	Mahalo	Towuti	Korban meninggal dunia akibat kecelakaan kerja saat pembuatan saluran air	-	1 Orang	-	Jenasah telah diserahkan pada keluarga untuk dimakamkan
18	Korban Meninggal Dunia	29 Desember 2025	Margomulyo	Tomoni Timur	Korban Meninggal dunia akibat tersengat Listrik atas nama Ryan Pratama di Desa Margomulyo	-	1 Orang	-	Jenasah telah diserahkan pada keluarga untuk dimakamkan

No	Jenis Kejadian	Tanggal	Desa	Kecamatan	Uraian Kejadian	Kerugian			Tidak lanjut/ Solusi
						Materi al	Korban Jiwa	Korban Luka	
19	Kekerasan Terhadap Anak	29 Desember 2025	Sumber Alam	Tomoni	Tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur oleh pelaku Kahar di Desa Sumber Alam	-	-	1 Orang	Pelaku telah dilaporkan pada pihak Kepolisian dan korban telah dibawah ke Puskesmas untuk dilakukan visum
20	Bencana Alam Kebakaran	29 Desember 2025	Arolipu	Wotu	Peristiwa kebakaran Pembangunan lantai 2 IGD RSUD I Lagaligo	300.000.000	-	-	Api telah dipadamkan oleh personil Pemadam Kebakaran

Program ini didukung 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, sebagai berikut

➤ **Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**

Indikator kegiatan yaitu Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. Dengan target kinerja 100%, terealisasi 100% atau capaian 100%. Kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang direncanakan pada triwulan 4 sebanyak 3 kegiatan dan yang terealisasi 3 kegiatan. Adapun kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial dilaksanakan di triwulan 3 yaitu:

1. Terlaksananya pemantauan kondisi keamanan dan ketertiban dilingkungan Masyarakat
2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan pelaporan keberadaan orang asing
3. Terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi Tim Kewaspadaan Dini

Adapun formulasi kegiatan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang} \\ & \text{dilaksanakan (Tw-n) } \mathbf{dibagi} \text{ Jumlah kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan} \\ & \text{penanganan konflik social yang direncanakan (Tw-n) } \times \mathbf{100\%} \\ & = 3/ 3 \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

1. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Indikator sub kegiatan ini yaitu jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah. Pada Triwulan 4 ditargetkan 52 orang yang mengikuti rapat koordinasi, terealisasi 52 orang atau capaian 100%.

Sub kegiatan diukur dengan menggunakan formula :

Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah (Tw-n)

Target = 52 Orang , Realisasi = 52 Orang

2. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Indikator sub kegiatan yaitu Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah. Ditargetkan 1 (satu) laporan dan terealisasi 1 (satu) laporan atau capaian kinerja 100%. Sub kegiatan diukur dengan menggunakan formula :

Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah (Tw-n)

Target Tw.4= 1 laporan, Realisasi Tw.4= 1 Laporan

3. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Indikator sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen hasil kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Ditargetkan 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen atau capaian kinerja 100%. Sub kegiatan diukur dengan menggunakan formula :

Jumlah dokumen hasil kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Tw-n)
 Target Tw.4= 1 dokumen, Realisasi Tw.4= 1 dokumen

B. Realisasi Anggaran

Capaian realisasi anggaran triwulan 4 tahun 2025, bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial berdasarkan anggaran kas pada triwulan 4 sebesar Rp. 1.432.799.600,- terealisasi sebesar Rp. 1.367.084.200,- atau 95,41%. Berikut table capaian realisasi anggaran sampai dengan triwulan 4 tahun 2025.

Tabel 3.

Realisasi Anggaran Triwulan 4 Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SD TRIWULAN 4 (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2025		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
06	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	1.432.799.600	1.432.799.600	1.367.084.200	95,41	65.715.400	4,59
1.	<i>Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial</i>	1.432.799.600	1.432.799.600	1.367.084.200	95,41	65.715.400	4,59
1.	Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik didaerah	180.427.600	180.427.600	176.675.200	97,92	3.752.400	2,08

2.	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	29.784.500	29.784.500	29.770.500	99,95	14.000	0,01
3.	Pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah	1.222.587.500	1.222.587.500	1.160.638.500	94,93	61.949.000	5,07
TOTAL BELANJA		1.432.799.600	1.432.799.600	1.367.084.200	95,42	65.715.400	4,59

Anggaran yang disediakan tidak terealisasi 100% dikarenakan :

1. Belanja mobilitas anggota Forkopimda untuk kegiatan luar daerah telah dilakukan penyesuaian anggaran pada perubahan anggaran 2025 dan anggaran ini sifatnya disediakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja diharuskan bagi setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Secara garis besar, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran kinerja Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Triwulan 4 Tahun 2025 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Secara umum hasil analisis pencapaian indikator kinerja bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik mencapai target yang ditetapkan atau 100%.
2. Dari sisi pencapaian akuntabilitas keuangan, tingkat capaian realisasi keuangan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sampai triwulan 4 tahun 2025 sebesar 95,41% berdasarkan anggaran kas atau sebesar Rp. 1.367.084.200,- dari pagu sampai triwulan 4 yaitu Rp. 1.432.799.600,-.

B. Saran.

Dalam rangka meningkatkan kinerja bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik ke depan, maka ada beberapa langkah yang akan dilakukan, secara umum, antara lain :

1. Akan melakukan percepatan realisasi anggaran sesuai dengan target yang telah direncanakan berdasarkan anggaran kas;
2. Akan meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal.

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulsel
Email No. Telp. (0474) 321279 Fax (0474) 321279 Malili, 92981
kesbangpol.lutim@gmail.com

Malili, 05 Januari 2026

Nomor : / /Bakesbangpol
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Evaluasi Triwulan 4 T.A 2025

Yth. Analis Forum Wasnas dan Staf Bid.Wasnas
di
Tempat

Sehubungan dengan telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan Triwulan 4 pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran 2026, maka dengan ini saudara diundang untuk rapat evaluasi yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 05 Januari 2026
Waktu : 09.00 wita
Tempat : Ruang Kerja Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Bidang Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik



HELENA,S.Sos

Nip. 19681010 200901 2 003



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulsel

No. Telp. (0474) 321279 Fax (0474) 321279 Malili, 92981

Email:kesbangpol.lutim@gmail.com

DAFTAR HADIR

Hari : Senin

Tanggal : 05 Januari 2026

Waktu : 09.00 wita - Selesai

Tempat : Ruang Kerja Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Kegiatan: Monev Internal Triwulan 4 Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Helena,S.Sos	Kepala Bidang	
2	Netty Andi Piawa,SE	Staf	
3	Israwati,S.Sos	Staf	
4	Kusnadi Kuddus,S.I.kom	Staf	
5			

Malili, 05 Januari 2026

Kepala Bidang Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik

HELENA,S.Sos

Nip. 19681010 200901 2 003



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulsel

No. Telp. (0474) 321279 Fax (0474) 321279 Malili, 92981

Email:kesbangpol.lutim@gmail.com

NOTULEN

- Rapat : Internal Triwulan 4
- Hari / Tanggal : Senin, 05 Januari 2026
- Waktu : 09.00 wita - Selesai
- Tempat : Ruang Kerja Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
- Pimpinan Rapat : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
- Peserta Rapat : Staf Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
- Pembahasan : 1. Senantiasa memanjatkan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Meningkatkan disiplin kerja dan menjaga kebersihan
3. Saling berbagi informasi
3. Memperhatikan kegiatan yang akan dilaksanakan di triwulan berikutnya
4. Bertanggung jawab dengan Tupoksi masing-masing staf
5. Melaksanakan tugas yang telah dibagikan oleh Kepala Bidang dan melaporkannya
6. Memperhatikan kegiatan

Demikian notulen rapat ini dibuat untuk dilaksanakan.

Pimpinan Rapat,

Notulis,

HELENA,S.Sos

NIP. 19681010 200901 2 003

ISRAWATI,S.Sos

NI PPPK. 19861206 202521 2 038

RAPAT EVALUASI TRIWULAN 4
HARI SENIN TANGGAL 05 JANUARI 2026





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulsel
No. Telp. (0474) 321279 Fax (0474) 321279 Malili, 92981
Email:kesbangpol.lutim@gmail.com

Malili, 23 September

2025

Nomor : 200.1.3.1/ 144 /Bakesbangpol
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Tim Kewaspadaan

Yth. Tim Kewaspadaan Kabupaten Luwu Timur
di
Tempat

Sehubungan dengan perkembangan kondisi saat ini serta untuk menjaga dan meningkatkan kewaspadaan dini di Kabupaten Luwu Timur, maka dengan ini diundang untuk hadir dalam rapat Tim Kewaspadaan, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 25 September 2025
Waktu : 08.30 wita
Tempat : Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Malili, 23 September 2025

Kepala Badan



GUNTUR HAFID, S.Pd., M.Si
NIP. 19710502 199208 1 001

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili.

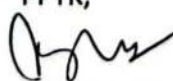
**DAFTAR HADIR
RAPAT TIM KEWASPADAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	INDAH ROSANTI	ANGKONA	1 B.	2
2	Setio Bendi	Angkora		
3	M. SALEH BANI PAS	TOYUTI	3	4
4	Halim	MALILI		
5	Rispono LD	TRANGKUNGAN	5	6
6	ARIF FIRMANSYAH. W	WOTU		
7	JEMARI MPAREH	WOTU	7	8
8	HARIS	WOTU		
9	HAMBANG BOB	MAILI	9	10
10	HIDAYAT RUSDI	TOYUTI		
11	RAMLI	MALILI	11	12
12	YOSEPH	MALILI		
13	JHONY	MALILI	13	14
14	RICKY	MALILI		
15	KERAWATI	KESB ANCPOL	15	16
16	ATIA USMAN			
17	EMI	MALILI	17	18
18	HASLINGA.	- - -		
19	RICKY YUNAT	- - -	19	20
20	JOKO	WOTU		
21	NETTY AP	MALILI	21	22
22	Ridwan H	- - -		
23	JAMILA	- - -	23	24
24	DIANA	- - -		
25	PUTRI	- - -	25	26
26	EGA	"		

27	HERMAWATI.	MALILI	27	28
28	Anugrah Lestani	Malili	29	30
29	Xuliana	Malili	31	32
30	GAPPAL	MALILI	33	34
31	M.PUSLI	tomoni	35	36
32	PIAN	malili	37	38
33	KUSNADI	Malili	39	40
34	M. RATA	malili	41	42
35	Ardiansyah	watu	43	44
36	ASHAR	WASUPONDA	45	46
37	BILLY	tomoni	47	48
38	BUDI	Mangkafana	49	50
39	huanani	kulama	51	52
40	IDEWA	malili		
41	Rauli	kesbang		
42	Wati	kesbang		
43	Vina	malili		
44	Salam	kesbang		
45	IQBAL	kesbang		
46	Masdar	kesbang		
47	Helena	kesbang		
48	Alfian	kesbang		
49	slamet Riyadi	watu		
50	Isuadi	kesbang		
51	Meli	kesbang		
52	Guntur Hafid	kesbang		

Malili, 25 September 2025

PPTK,



HELENA, S. Sos

Nip. 19681010 200901 2 003

RAPAT TIM KEWASPADAAN DINI
BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TANGGAL 25 SEPTEMBER 2025





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Dr. Sam Ratulangi Telp/Fax. (0474) 321279

M A L I L I, 92981

NOTULEN RAPAT/KEGIATAN

- Kegiatan : Rapat Tim Kewaspadaan
Hari/Tanggal : Kamis, 25 September 2025
Waktu : 08.30 wita – 11.30 wita
Tempat : Aula Kantor Kesbangpol Luwu Timur Puncak Indah Kecamatan Malili.
- Agenda Rapat : Silaturahmi antara Tim Kewaspadaan
- Pembahasan : 1. Tujuan rapat Tim Kewaspadaan untuk meningkatkan koordinasi silaturahmi antara sesama Tim Kewaspadaan yang bersifat diskusi/saling bertukar data informasi terkait dengan situasi keamanan, ketertiban dan kondisi yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815).
3. Tugas Tim kewaspadaan meliputi mencari, mengumpulkan, mengolah, menganalisa informasi secara cepat dan akurat dan melaporkan kepada pimpinan.
4. Menyampaikan laporan secara cepat dan akurat Ketika terjadi perihal kegiatan dan kehidupan social kemasyarakatan.
5. Membuat laporan dan menyampaikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

6. Menyikapi situasi dan kondisi agar diteksi dini segala kemungkinan yang terjadi terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) yang dapat mempengaruhi stabilitas Ipoeksosbudhankam dan masalah-masalah lainnya di daerah.

Demikian Notulen ini dibuat

Mengetahui :

Kepala Bakesbangpol



GUNTUR HAFID, S.Pd.M.Si
NIP : 19710502 199208 1001

Notulis

Kabid.Kewaspadaan Nasional
dan Pennaganan Konflik



HELENA, S.Sos
Nip : 196810102009012003

LAPORAN KEGIATAN
TRIWULAN IV
TAHUN 2025

BIDANG POLITIK DALAM
NEGERI DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan Kehadirat Tuhan Allah SWT, berkat karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Triwulan IV Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Tidak lepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi penyusun bahasa maupun segi lainnya, yang sangat jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan waktu.

Akhir kata kami berharap semoga Laporan ini dapat bermanfaat dalam upaya untuk mewujudkan konsistensi kami dalam pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi secara berkala sehingga daerah Kabupaten Luwu Timur lebih baik di masa yang akan datang dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Malili, 05 Januari 2026
Kepala Politik Dalam Negeri dan
Organisasi Kemasyarakatan



WATI, S. Kom., MM
Pangkat : Pembina
NIP : 197805112006042030

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam mewujudkan Pemerintahan dan Pembangunan yang berhasil harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya mampu memenuhi aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita yang diharapkan yaitu kehidupan yang makmur, tentram dan dapat bersinergi dengan Pemerintah dengan menerapkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan terbuka, akuntabel, jelas, terukur, dan legitimate serta dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintahan yang bersih yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN.

Dalam rangka mendukung kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan Sumber Daya yang tersedia dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Pemerintahan yang bersih. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media Pertanggungjawaban kepada Bupati dan masyarakat publik secara umum. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah serta Partisipasi Masyarakat.

Dokumen laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat sebelumnya, serta

merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai sejauh mana efektifitas pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan serta mengukur pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyusun laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025.

2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
- g. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33).

BAB II PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun Anggaran 2025 yang di tandatangani bersama antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan untuk mencapai target kinerja jangka menengah sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, terdapat 2 (dua) Program, 2 (dua) kegiatan dengan 4 (empat) sub kegiatan sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu:

Tabel 1.

Perjanjian Kinerja Eselon IV Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi
Kemasyarakatan Tahun 2025

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2025
I.	Meningkatnya peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase capaian peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100%
1.	Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Persentase capaian pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan situasi politik daerah	100%
a.	Tersusunnya program kerja dibidang Pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala	Jumlah dokumen program kerja dibidang Pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah,	4 Dokumen

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Triwulan IV Tahun 2025

No	Basaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahun 2025
	daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	serta pemantauan situasi politik di daerah yang disusun	
b.	Terlaksananya kebijakan di bidang Pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	57 Orang
c.	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	4 Laporan
II.	Meningkatnya pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	100%
1.	Terlaksananya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	108 unit
a.	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	4 laporan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat suatu kegiatan/program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dari organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi Kabupaten Luwu Timur.

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Sehubungan dengan itu dan demi pencapaian good governance (*Pemerintahan yang Bersih*), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur telah berupaya untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja ke arah terwujudnya lembaga yang baik dan dipercaya.

Laporan ini diharapkan menjadi sistem yang handal untuk memperbaiki proses-proses pengambilan keputusan mulai dari perumusan kebijakan strategis, perencanaan kinerja tahunan, pengukuran kinerja, laporan akuntabilitas kinerja, serta evaluasi dan tindak lanjut atas evaluasi, berupa perbaikan atau pemecahan atas masalah yang dihadapi secara berkelanjutan

Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap target perjanjian kinerja tahun 2025 yang telah disepakati antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu.

Tabel. 2
Pengukuran Capaian Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja
Triwulan - IV

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Triwulan IV Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
I.	Meningkatnya peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan etika serta budaya politik	Persentase capaian peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100%	100-	100%
1.	Terlaksananya pemantapan dan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Persentase capaian pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan situasi politik daerah	100%	100%	100%
a.	Tersusunnya program kerja dibidang Pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah dokumen program kerja dibidang Pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
b.	Terlaksananya kebijakan di bidang Pendidikan politik, peningkatan demokrasi,	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang	57 orang	57 orang	100%

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Triwulan IV Tahun 2025

No	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Triwulan IV Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
	fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah			
C.	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%
II.	Meningkatnya pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	30 unit	57 unit	190%
1.	Terlaksananya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	30 unit	57 unit	190%
a.	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	1 laporan	1 Laporan	100%

Berdasarkan Evaluasi atas Rencana Aksi pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta budaya Politik.

Indikator program yaitu “Persentase capaian peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik”. Pada triwulan IV indikator ini telah mencapai target 100%. Capaian tersebut tercapai setelah seluruh partai politik penerima bantuan keuangan di Kabupaten Luwu Timur menuntaskan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahun 2024, sesuai hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Melengkapi dan menyampaikan dokumen permohonan pencairan dana bantuan keuangan tahun anggaran 2025 ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Formulasi indikator sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah Partai Politik yang Memenuhi Syarat Pengajuan Bantuan} \\ & \text{Keuangan Partai Politik dibagi Jumlah Partai Politik yang menerima} \\ & \text{bantuan Keuangan Partai Politik} \times 100\% \\ & = 11 \text{ Partai Politik} / 11 \text{ Partai Politik} \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

Tabel 3.
Daftar Partai Politik dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2025

No	Partai Politik	Jumlah Kursi	Jumlah Perolehan Suara	Bantuan Keuangan / Suara (Rp)	Besaran Bantuan Keuangan (Rp)	Ket
1.	PKB	1	7.680	6.515,00	50.035.200,00	-
2.	GERINDRA	2	9.698	6.515,00	63.182.470,00	-
3.	PDI-P	10	37.307	6.515,00	243.055.105,00	-
4.	GOL-KAR	4	25.654	6.515,00	167.135.810,00	-
5.	NASDER	7	32.098	6.515,00	209.118.470,00	-
6.	PKS	2	8.117	6.515,00	52.882.255,00	-
7.	PAN	5	21.993	6.515,00	143.284.395,00	-
8.	HANURA	1	8.317	6.515,00	54.185.255,00	-
9.	DEMOKRAT	1	8.871	6.515,00	57.794.565,00	-
10.	PPP	1	3.825	6.515,00	24.919.875,00	-
11.	GELORA	1	5.291	6.515,00	34.470.865,00	-
JUMLAH		35 Kursi	168.851 Suara	6.515,00	1.100.064.265,00	-

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, sebagai berikut :

1.1. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Indikator kinerja yaitu Persentase capaian pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan situasi politik daerah dimana dimana Kegiatan ini merupakan rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan di bidang Pendidikan politik etika budaya politik, etika budaya politik

dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan situasi politik daerah yang dilaksanakan disetiap triwulan.

Formulasi indikator sebagai berikut :

Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan situasi politik daerah

1.1.1. Sub Kegiatan : Penyusunan program kerja dibidang Pendidikan politik etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen program kerja dibidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah. Target yang ditetapkan pada triwulan III adalah 1 (satu) laporan dan terdistribusi sebesar 1 Laporan yang tersusun dengan capaian kinerja 100%.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan pemantauan situasi politik pasca Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, melakukan pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Luwu Timur untuk mengetahui perkembangan politik dan menciptakan stabilitas politik pemerintahan di daerah. Dalam hal ini pelaksanaan evaluasi perkembangan politik di daerah dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan pemantauan secara langsung di lapangan terhadap isu-isu atau kerawanan politik, termasuk pelaporan hasil monitoring atau pemantauan dari berbagai sumber sehingga diharapkan pasca Pemilu/Pilkada 2024 yang telah berlalu akan menciptakan situasi dengan tertib dan aman dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Formulasi indikator sebagai berikut :

Jumlah dokumen program kerja dibidang politik yang disusun tepat waktu

1.1.2. Sub Kegiatan : Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendidikan politik etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah. Target kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti sub kegiatan ini dan ditargetkan sebanyak 52 orang.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah berupa rapat evaluasi Partai Politik terkait bantuan keuangan partai politik sehingga Partai Politik dapat mengetahui dan memahami terkait pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik.

Formulasi indikator sebagai berikut :

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelaksanaan kebijakan di bidang politik

Target = 52 orang , Realisasi = 52 orang

1.1.3. Sub Kegiatan : Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang Pendidikan politik etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilihan

umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah. Target yang ditetapkan pada triwulan IV adalah 1 (satu) laporan dan terealisasi sebesar 1 Laporan dengan capaian kinerja 100%.

Formulasi indikator sebagai berikut :

Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang politik yang disusun tepat waktu

Bentuk kegiatan ini adalah melakukan pemantauan situasi politik di wilayah Kabupaten Luwu Timur terkait pasca pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Tabel 4.
Data Pemantauan Situasi Politik di Daerah

No	Kecamatan	Penjelasan
1.	Nuha	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif
2.	Towuti	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif
3.	Wasuponda	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif
4.	Malili	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif
5.	Angkona	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif
6.	Kalaena	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif
7.	Mangkutana	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif
8.	Tomoni	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif
9.	Tomoni Timur	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif
10.	Wotu	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif
11.	Burau	Perkembangan situasi politik dalam keadaan aman dan kondusif

2. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Indikator program yaitu persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi. Pada triwulan IV ditargetkan sebanyak 24 rumah ibadah, kelompok, pendidikan dan ormas. Adapun realisasi sebanyak 43 rumah ibadah, kelompok, pendidikan dan ormas atau capaian kinerja 179,16 % dari target triwulan IV. Target tercapai yang ditetapkan pada triwulan IV, banyak masyarakat yang mengajukan permohonan ke OPD yang terkait terutama rumah ibadah, kelompok tani dan ormas yang mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan,



pelaporan keberadaan atau perpanjangan untuk penerima bantuan dari OPD terkait banyak diajukan pada triwulan IV dengan data permohonan masyarakat dari data triwulan I sampai dengan triwulan IV ketercapaian sebesar 98 rumah ibadah, kelompok, pendidikan dan ormas dengan target sebesar 78 rumah ibadah, kelompok, pendidikan dan ormas atau sebesar 125,64%.

Formulasi untuk mengukur capaian kinerja program ini adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &\text{Jumlah Ormas yang diberdayakan dan diawasi} \div \text{jumlah ormas yang} \\ &\text{ditargetkan pada triwulan III tahun 2025} \times 100\% \\ &= 43 / 24 \times 100\% = 179,16\% \end{aligned}$$

Tabel 5.
Data Ormas/Kelompok Tani/Kelompok Nelayan/Kelompok Seni
Budaya/Rumah Ibadah/Sekolah Swasta
Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
1.	Mesjid	10 Mesjid
2.	Gereja	8 Gereja
3.	Pura	2 Pura
4.	Lembaga Pendidikan / Sekolah	0 Sekolah
5.	Kelompok Tani/Kelompok Nelayan/Kelompok Seni	25 Kelompok
6.	Ormas	12 Ormas
Jumlah		57 Unit

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut : /

2.1. Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Indikator kegiatan yaitu jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi. Adapun target ormas yang diawasi dan diberdayakan pada triwulan IV yaitu sebanyak 30 unit ormas/LSM/Rumah Ibadah/Kelompok Tani dan Kelompok Nelayan/Sekolah, terealisasi

57 Ormas/LSM/Rumah Ibadah/Kelompok Tani dan Kelompok Nelayan atau capaian 190 %.

Formulasi indikator kegiatan sebagai berikut :

Jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi

Target = 30 Unit; Realisasi = 57 Unit

2.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah

Indikator sub kegiatan ini Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah . Adapaun bentuk kegiatannya adalah melakukan pemantauan Ormas, pengawasan terhadap Ormas/LSM, menerbitkan surat keterangan untuk Rumah Ibadah, Kelompok Tani, Kelompok Nelayan dan sekolah-sekolah swasta, serta mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Ormas/LSM kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum untuk Ormas dan LSM yang memenuhi persyaratan. Di triwulan IV ditargetkan 30 Ormas/LSM/Rumah Ibadah/Kelompok Tani/Kelompok Nelayan/Sekolah Swasta yang diterbitkan Surat Keterangan, pelaporan keberadaan atau perpanjangan, dan terealisasi 57 Ormas/LSM/Rumah Ibadah/Kelompok Tani/Kelompok Nelayan/Sekolah Swasta yang diterbitkan Surat Keterangan, pelaporan keberadaan atau perpanjangan atau 190 %

Formulasi mengukur capaian kinerja adalah :

Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas yang disusun tepat waktu

B. REALISASI KEUANGAN

Realisasi keuangan atas pelaksanaan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan disajikan pada tabel berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET S/D TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2025		TOTAL BISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
03	Program Peningkatan Feron Partal Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.238.202.265	1.238.202.265	1.230.452.775	99,37	7.749.490	0,63
1.	Perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	1.238.202.265	1.238.202.265	1.230.452.775	99,37	7.749.490	0,63
1.	Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	61.121.000	61.121.000	58.178.000	95,18	2.943.000	4,82
2.	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	1.153.922.265	1.153.922.265	1.149.437.845	99,61	4.484.420	0,39
3.	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	23.159.000	23.159.000	22.836.930	98,61	322.070	1,39

NO	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET R/D TRIWULAN IV (BERDASARAN ANGGARAN BAR)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2025		TOTAL BISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
04	Program pemberdayaan dan penguasaan organisasi kemasyarakatan	77.664.400	77.664.400	66.888.500	86,13	10.775.900	13,87
1.	Perumusan kebijakan teknis dan pematapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan penguasaan organisasi kemasyarakatan	77.664.400	77.664.400	66.888.500	86,13	10.775.900	13,87
1.	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendafaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediai sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	77.664.400	77.664.400	66.888.500	86,13	10.775.900	13,87
JUMLAH		1.315.866.665	1.315.866.665	1.297.341.275	98,59	18.528.390	1,44

Berdasarkan tabel di atas secara umum capaian realisasi anggaran tahun 2025 pada Bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dapat dilihat bahwa realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV sebesar Rp. 1.297.341.275,- atau 98,59% dari pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 1.315.866.665,- hampir mencapai target setelah seluruh partai politik penerima bantuan keuangan di Kabupaten Luwu Timur menuntaskan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahun 2024, sesuai hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Melengkapi dan menyampaikan dokumen permohonan pencairan dana bantuan keuangan tahun anggaran 2025 ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagai syarat mutlak dilakukan pencairan bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pada program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik. Berdasarkan pagu anggaran sampai dengan triwulan IV tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 1.238.202.265,- terealisasi sebesar Rp. 1.230.452.775,- atau 99,37% hampir mencapai target setelah kegiatan evaluasi laporan keuangan partai politik tahun 2025 dan verifikasi laporan keuangan partai politik tahun 2025 telah dilaksanakan dan pencairan untuk bantuan keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp. 1.100.064.265 terealisasi sebesar Rp. 1.100.064.265,- atau 100% dikarenakan semua Partai (11) telah

*Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Triwulan IV
Tahun 2025*

melengkapi dan menyampaikan dokumen permohonan pencatatan dan bantuan keuangan tahun anggaran 2025 ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan,

Pada program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Berdasarkan target anggaran sampai dengan triwulan IV tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 77.664.400,- terealisasi sebesar Rp. 66.888.500,- atau 86,13%.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja diharuskan bagi setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Secara garis besar, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran kinerja Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Triwulan IV Tahun 2025 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada triwulan IV realisasi kinerja dan keuangan untuk program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik telah mencapai target setelah seluruh partai politik penerima bantuan keuangan di Kabupaten Luwu Timur menuntaskan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahun 2024, sesuai hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang harusnya terealisasi pada triwulan II namun mengalami keterlamabatan dikarenakan menunggu hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan parpol tahun 2024;
2. Capaian kinerja program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yaitu terealisasi sebesar 57 surat keterangan ormas/LSM/Kel. Tani dan Nelayan/Rumah Ibadah dan Lembaga Pendidikan atau melebihi target yaitu tercapai 190%. Berdasarkan data jumlah ormas/LSM/Kel. Tani dan Nelayan/Rumah Ibadah dan Lembaga Pendidikan yang diawasi dan diberdayakan sampai dengan

- triwulan IV tahun 2025 sebanyak 57 surat keterangan/kelompok dari target 30 surat keterangan/kelompok;
3. Realisasi anggaran bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan sampai dengan triwulan IV berdasarkan pagu anggaran tahun 2025 yaitu Rp. 1.315.866.665,- terealisasi sebesar Rp. 1.297.341.275,- atau 98,59%.
 4. Realisasi anggaran program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik sampai dengan triwulan IV berdasarkan pagu anggaran tahun 2025 yaitu Rp. 1.238.202.265,- terealisasi sebesar Rp. 1.230.452775,- atau 99,37%.
 5. Realisasi anggaran program Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan sampai dengan triwulan IV berdasarkan pagu anggaran tahun 2025 yaitu Rp. 77.664.400,- terealisasi sebesar Rp. 66.888.500,- atau 86,13%.

Malili, 05 Januari 2026

Kabid. Poldagri dan Organisasi
Kemasyarakatan



WATI, S. Kom., MM

Pangkat : Pembina

NIP : 197805112006042030





LAPORAN KEGIATAN
SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK KEPADA MASYARAKAT
TAHUN 2025
Senin, 01 Desember 2025

1. LATAR BELAKANG

- A. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK;
- B. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM;
- C. INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 1982 TENTANG PENDIDIKAN POLITIK BAGI GENERASI MUDA;
- D. PERMENDAGRI NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITIK
- E. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

2. DASAR KEGIATAN

KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN DPA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. MAKSUD :

MELALUI KEGIATAN SOSIALISASI INI, DIHARAPKAN KEPADA MASYARAKAT KHUSUSNYA GENERASI MUDA DAPAT SEMAKIN BERDAYA, KRITIS DAN SIAP MENJADI AGEN PERUBAHAN DEMI MEWUJUDKAN DEMOKRASI YANG SEHAT SERTA MASA DEPAN DAERAH DAN BANGSA TERKhusus DI KABUPATEN LUWU TIMUR YANG LEBIH, MAJU DAN SEJAHTERA.

b. TUJUAN :

MELALUI PENDIDIKAN POLITIK MEMBANTU MASYARAKAT AGAR LEBIH AKTIF, PARTISIPATIF DAN BERTANGGUNG JAWAB DALAM PROSES DEMOKRASI DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LUWU TIMUR.

4. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK KEPADA MASYARAKAT DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 01 DESEMBER 2025 DI RUANG AULA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LUWU TIMUR

5. PESERTA

TERDIRI DARI MASYARAKAT, ORGANISASI MASYARAKAT, PERWAKILAN PARTAI POLITIK DAN PEMILIH PEMULA... DAN DI IKUTI +150 ORANG

6. NARASUMBER

1. BUPATI LUWU TIMUR
2. KETUA DPRD KAB. LUWU TIMUR
3. BAWASLU KAB. LUWU TIMUR
4. KPU KAB. LUWU TIMUR
5. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. LUWU TIMUR

7. RANGKAIAN KEGIATAN

DIAWALI DENGAN PEMBUKAAN, PENYAJIAN MATERI DILANJUTKAN DENGAN DIALOG/TANYA JAWAB.

8. MATERI

- PERLUNYA SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT OLEH BUPATI LUWU TIMUR (DIWAKILI SEKRETRASI DAERAH)
- MEMAHAMI DEMOKRASI DAN PERTISIPASI MASYARAKAT OLEH WAKIL KETUA DPRD
- PENGAWASAN PARTISIPATIF OLEH BAWASLU
- DEMORASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT OLEH KETUA KPU
- PENDIDIKAN DEMOKRASI OLEK KEPALA BADAN KESBANGPOL

9. KESIMPULAN

DARI KELIMA NARASUMBER MENGHIMNAU KEPADA PESERTA UNTUK MENDUKUNG PERAN MASYARAKAT DALAM RANGKA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSNANAAN PEMILU

MALILI, 02 DESEMBER 2025

PPTK,

WATIS.KOM.MM

Pangkat : Pembina

NIP : 197805112006042030

**DAFTAR PENERIMA TRANSPORT PESERTA
KAMPUS DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK KEPADA MASYARAKAT**

: Senin, 01 Desember 2025
 : Pukul 13.00 Wita - Selesai
 : Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	NAMA	JK	UANG TRANSPORT	PAJAK 5%	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN	
		L/P					
1	Nusra Muller		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	1	
2	RAPUNIA	L	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	2	
3	ASMAWATI	P	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	3	
4	KAWIT	L	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	4	
5	MUHAMMIDIN		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	5	
6	MURUAYATI	"	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	6	
7	Agus Meyani		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	7	
8	M. Sally		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	8	
9	ARI M.		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	9	
10	MEGAWATI		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	10	
11	KURBANI		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	11	
12	MUH.ZULKARISMA	L	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	12	
13	MUH.FIRDI OR RIDA	L	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	13	
14	SUKIRANI		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	14	
15	Andi Herlina		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	15	
16	Haruni Djandi S.S		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	16	
17	PONIASIH		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	17	
18	Indra		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	18	
19	Hambra Bob		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	19	
20	MUTAR		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	20	
21	SRI NUR GONARIN		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	21	
22	H. Basma	L	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	22	
23	ASRIANI		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	23	
24	IQBAL		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	24	
25	m. amir dca	L	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	25	
26	M. Shap. HMI		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	26	
27	MUH.RIZKY		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	27	
28	Daffa Hamid Fida	L	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	28	
29	Hardi muhan. nob	L	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	29	
30	NADIA		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	30	

			Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	31		32	
			Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
			Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	33			
34	Anggun Mulia	P	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000			34	
35	Henda wira P	L	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	35		36	Luiz
36	Bendika		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
37	Roski Dwi		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	37		38	Est.
38	Ridley Mande'	L	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
39	Naira Dwi Ardyanthi	P	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	39		40	Spz
40	Sufiyanto	L	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
41	IRFAN GUNAWAN	L	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	41		42	S. S. S.
42	Franziska Sidiqas	L	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
43	M. PERKY	L	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	43		44	LML
44	LIDERY. P	L	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
45	Damanis SKH	P	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	45		46	
46	Batmanthi	P	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
47	Yakhabat Theonka.	P	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	47		48	Sei
48	Salsabila Aisyah	P.	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
49	JABIR. SPDI	L	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	49		50	
50	Ritka	P	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
51	Bezia Pabuti		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	51		52	
52	Martati		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
53	Rahasyari		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	53		54	
54	Hq Ulpah halle		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
55	MARDIAH GUTUP	P	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	55		56	
56	Hj. ERKI		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
57	Elizabet . M		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	57		58	
58	ANIALUD DIN		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
59	ASSYIFA P. N	P	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	59		60	
60	Keza Apillya P.	P	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
61	Muh Fitri. I		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	61		62	
62	Firhan Azya Nur	L	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
63	Riqih Ramadhani P	L	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	63		64	
64	Orvy Gunawan	L	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
65	Hj. NURWATI DA	P	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	65		66	
66	Epa Lawa		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				

		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	67		68	
		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
	^{tanggal} Kelinca Kenjry	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	69		70	
70	IKWANTO	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
71	MUH. IKRAM	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	71		72	
72	Naam cahaya	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
73	Normin fariza	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	73		74	
74	RIATI RANSYATI	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
75	Muh. Dm. Huhu	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	75		76	
76	Ainuddin	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
77	Budiman	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	77		78	
78	HIDAMATI	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
79	ANDI SULOANUS	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	79		80	
80	ANNAS PALKA	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
81	SRI DAMAYANTI	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	81		82	
82	HI MADE BULANDAN	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
83	Hasan	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	83		84	
84	Haliza Syam	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
85	Meghawan Isti	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	85		86	
86	Darwanahfi	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
87	AISYA ADRIANI	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	87		88	
88	Hendry Panding	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
89	Tristan Bagus Merik	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	89		90	
90	ASKAR. AS	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
91	ANDI NURHIDHIT.	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	91		92	
92	Fardi handiarsyah	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
93	Jayas Supren.	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	93		94	
94	Nurlala	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
95	Softa P. S	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	95		96	
96	ISWAN	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
97	RISMA	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	97		98	
98	IRWAN SADRi	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
99	Harguliani S.p.	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	99		100	
100	Yuliana R.P.	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
101	IRWAN JAYH	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	101		102	
102	RAMLI HABIR	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				

			Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	103	Pat	104	Ab
			Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
	RAMIATI		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	105	HI	106	Ju
106	FUERLIN A.M, RT		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
107	OR KAMUSANTO		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	107	Ded	108	Ded
108	Harpiani		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
109	Ekanah		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	109	du	110	Wt
110	CUNONK		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
111	TAKAPE		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	111	Ce	112	Papuz
112	Bella Kim. R		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
113	yulm. p	P	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	113	Banyar	114	gt
114	Ernawati	P	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
115	HAENAN	D	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	115	gt	116	AS
116	A. Luku. W	D	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
117	I Wayan Ariana	L	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	117	Kbul	118	gt
118	Syafreddi	L	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
119	Syamsuddin.	L	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	119	gms	120	gt
120	Dodi Alpayot	L	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
121	ITTAL JANNAH	P	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	121	gt	122	Ju
122	BARLIWANTA		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
123	NASRU	L	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	123	gt	124	Pudja
124	Budirman	L	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
125	Doburrahmat	L	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	125	gt	126	Ju
126	Jhony	L	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
127	Husni M	L	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	127	Hul	128	Lu
128	Lisa adriani	P	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
129	MUH. Firmansyah	L	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	129	Ju	130	Dya
130	Dinda	P	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
131	Anna Today	P	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	131	gt	132	gt
132	Sahrul		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
133	ALGA KACA		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	133	gt	134	gt
134	Aisyah Zahra	P	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
135	Citra Ayu		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	135	gt	136	gt
136	HERI IMRAIN		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				
137	PUTRA		Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	137	gt	138	gt
138	Naula Miranda	P	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000				

			Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	139	<i>Emir</i>	140 <i>Femp</i>
			Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000			
	Jumardun	L	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	141	<i>Jmp</i>	142 <i>Alay</i>
142	NAN BARRI	J	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000			
143	Majra Haulan	P	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	143	<i>As</i>	144 <i>qut</i>
144	Sista aza	P	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000			
145	Jadrian Lina	L	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	145	<i>FDef</i>	146 <i>Styul</i>
146	RANI EPILORI	P	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000			
147	Gerri mop	P	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	147	<i>Bmp</i>	148 <i>Atrot</i>
148	Naila Mirinda	P	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000			
149	Refan Syipudin	P	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000	149	<i>Cluf</i>	150 <i>Quel</i>
150	Josipa	P	Rp 100.000	Rp 5.000	Rp 95.000			
TOTAL			Rp 15.000.000	Rp 750.000	Rp 14.250.000			



SALAM LATIF, S.H., M.Si., CGCAE
NIP. 196901021969031007

WTK

WATI, S.Kom., M.M.
NIP. 197805112006042030

Malili, 01 Desember 2025
Bendahara Pengeluaran,

ISWADLSAP
NIP. 197806052003121007

DAFTAR PENERIMA ATK
KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK KEPADA MASYARAKAT

Tanggal
 Waktu
 Tempat

: Senin, 01 Desember 2025
 : Pukul 13.00 Wita - Selesai
 : Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	NAMA	JK	INSTANSI	TANDA TANGAN	
		L/P			
1	Nasta MULLER.		FKPP 2	1	2
2	RAPUNHILU	L	FK PP 1		
3	ASMAWATI. Lapsu	P	PP. Pemuda Pancasila	3	4
4	NAWIP	L	BELUGK		
5	MUHIDDIN	L	BELNEG	5	6
6	MURHAYATI	P	IMM		
7	Agas Muzani	P	IMM	7	8
8	Mr. Saleh.	L	Musyawarah		
9	ARI Mustopa.	L	Senkon. MP.	9	10
10	MEGAWATI	P	SRIKADDI		
11	KURBANI		SRIKADDI	11	12
12	Moh. Zulfikar. ISYAR	L	SMAN 2		
13	Moh. Fiqri. AR RIZQI	L	SMAN 2	13	14
14	Syukri. SMI	P	Aisya.		
15	Andi Hertina	P	MAPE Pemuda Pancasila	15	16
16	Harni Djamzidi	P	Ketua PCA ANKONA		
17	PONASIH	P	TP PKK kee ANKONA	17	18
18	Wati. S.	P	Bepo.		
19	Hanks BOB	L	ORGANISASI	19	20
20	MUNAR	L	ORGANISASI		
21	Yulian. P.	P.	Stb. Pemuda Pancasila	21	22
22	SRI NUR QOMARIYAH	P.	KBPPP.		
23	H. Busro. S.	L	LDH Laks	23	24
24	ASRIADI	L	POMPESSI		
25	IQBAL	L	POMPESSI LUWU	25	26
26	M. Anul Yasin inder	L	SMAN 2 Luwu		
27	Dede Alfiyat	L	SMAN 2 Luwu	27	28
28	M. Ishaq. HM	L.	Pemuda Muhammadiyah		

		L	SMAN 01 WI TOMONI	29		30	
		L	— II —				
31	Hardi Munom. Nabil	L	SMAN 01 WI TOMONI	31		32	
32	LIAPOLI		EKPI				
33	IRWAN JAYA	L	SMAN 01 WI TOMONI	33		34	
34	HASLINA	P	KARANG TARUNA				
35	INJOMAN Sugeng	L	Ketua PWD	35		36	
36	WAYAN NARANDA	L	PWD				
37	Anggun Mulla	P	SMAN 9 LUWUTIMUR	37		38	
38	Hendar Wira P	L	SMAN 4 LUWUTIMUR				
39	Bendika	L	SMAN 9 LUWUTIMUR	39		40	
40	Resti Dwi	L	SMAN 8 LUWUTIMUR				
41	Ridley Mande'	L	SMAN 8 LUWUTIMUR	41		42	
42	Naira Dwi Ardlyanti	P	SMAN 8 LUWUTIMUR				
43	Ermant		SMAN 1 LUWUTIMUR	43		44	
44	Sufiyanto Gommam	L	GAMKI				
45	IRFAN GUNAWAN	L	SMAN 1 LUWUTIMUR	45		46	
46	FRANSISKUS SA'DING	L	Pemuda Katolik				
47	LIVERY FRABU	L	Pemuda Katolik	47		48	
48	Damavis. SHU	P	Stap Ahli PKK Kab				
49	Batumantri	P	PKK Kab. POKJA 2	49		50	
50	Yakhebat Heona Amabel	P.	SMAN 1 LUWUTIMUR				
51	Salsabila Aisyah	P.	SMAN 1 LUWUTIMUR	51		52	
52	JABIR. SPd.I. Gt	L	PPD. LDII				
53	PITTA	P	FKK LUTIM	53		54	
54	Kecia Potubi	P	GAMKI LUTIM				
55	Martati April	P	DWP Kab.	55		56	
56	Ratnasyan	P	DWP Kab				
57	Hj Ulfa Halik	P	PWP Kab	57		58	
58	MARDIATA GUMUR	P	DWP KAB				
59	Elizabeth M.	P	Ketua TP PKK Kecamatan	59		60	
60	Abdurrahmat	L	KMP				
61	Harpani	P	PKK Kec. Tomoni Timur	61		62	
62	Hj ERNI	P	BKMT.				

	ANINDYAN	L	PP. IPWALTIM	63		64	
	ANINDYAN P N	P	SMAN 3 LUTIM				
65	Kens Apollys P.	P	SMAN 3 LUWU Timur	65		66	
66	Muh Fiqri Iskandar	L	SMAN 3 LUTIM				
67	Firkhan Aaya Nur	L	SMAN 6 Lutim	67		68	
68	Riqil Ramadhan P	L	SMAN 6 Luwu Timur				
69	Ovny Gunawan	L	SMAN 6 Luwu Timur	69		70	
70	HAGINTI	P	SMAN 6 Luwu Tim				
71	A. Luluw	P	SMAN 3 LUWU raf	71		72	
72	Eka Cewa	P	PKK 4 TP PKK kab				
73	Sarwani	P	PKK 3 TP PKK kab	73		74	
74	B. Lani Tanggalo	P	PKK 4 TP PKK kab				
75	Relince Sengry	P	DWP Kabupaten	75		76	
76	IRWANTO	L	SMAN 3 LUTIM				
77	MUHAMAD KRAN	L	SMAN 13 LUTIM	77		78	
78	Nurrah Cahaya	P	SMAN 13 LUTIM				
79	Nurmiyah Fatwa	P.	SMAN 13 LUTIM	79		80	
80	I Wayan Ariana	L	SMAN 13 LUTIM				
81	FAMPANSIAH	L	IPMAKTIM	81		82	
82	Muh Rina Ibrahim		Muhammadiyah Lutim				
83	ANUDDIN	C	Struktur DPPD	83		84	
84	Buchman	L	Ket. Gp ANSOR				
85	HOATA	L	GP ANSOR	85		86	
86	ANZI SURONO &	L	KBPP POLRI				
87	ANNIS PAKK		GARD LUTIM	87		88	
88	SA DARMAYANTI	P	PERADAH LUTIM				
89	TI MADE BILANDARI	P	PERADAH LUTIM	89		90	
90	HASAN	L	XII LUTIM				
91	Haliza Syam	P	DWP Kab	91		92	
92	Megawati Iskandar	P	PKK KAS				
93	Syatriadi	L	SMAN 2 Lutim	93		94	
94	KADILAH	P	PKK Lutim				
95	Mayasari	P	PKK Lutim	95		96	
96	DARMAWATI	P	TP PKK MARI				

	ADRIANI	P	DWID	97		98	
	hendry ramdhy	L	SMAN 5 LUWU TIMUR				
99	Tristan Bagus Melalo	L	SMAN 5 LUWU TIMUR	99		100	
100	Syamsuddin.	L	SMAN 5 LUWU TIMUR				
101	ASKAR AC.	L	GARDA LUTIM	101		102	
102	ANDI NURFAIDAH	P	SMK 2 LUTIM				
103	Fardi hardiansyah	L	SMK 2 LUTIM	103		104	
104	Jayus Sagana	L	Belang. Media.				
105	Nur Iela	P	MWP	105		106	
106	Sofian Y G	L	PP				
107	ISWAN	L	PASCA UIN MKS	107		108	
108	ITRAL JANNAH	P	KORANG TORUNO				
109	RISMA	P.	PKK Kabupaten	109		110	
110	IRWAN SAPRI	L	PD IN				
111	BARLIANTA			111		112	
112	Haryuliani. s.pj.	P.	PKK Kabupaten				
113	Yuniang R.T.	P.	Srikandi PP lab. Luth	113		114	
114	RAMLI HABIA	L	Pendamping				
115	FITRIANI	P	pendamping	115		116	
116	MAYASARI	P	STAR KPU				
117	RAMLAN	P	Star KPU	117		118	
118	TWEPLIN A.M, ST	P	BP3 Pemuda Pancasila				
119	DARMAWANNA	P.	BP3 Pemuda Pancasila	119		120	
120	Harpani	P	PKK Tomoni Timur				
121	CULANK		POTRET CUTH	121		122	
122	TAKAPE		ORAU				
123	FITRIANI	P	pendamping	123		124	
124	M. RESKI	L					
125	Hj. NURWAHIDA	P	KEC. KALBENA	125		126	
126	Bella Kira. R	P					
127	NASRUL	L	WAHDAH	127		128	
128	Budirman	L	wahdah				
129	Johnny	L	KNPI	129		130	
130	HUSNI M	L	SEIKOM MP				

	Muti Firmansyah	P	SMAN 7 LUTIM	131		132	
		L	SMAN 7 LUTIM				
133	Dinda	P	SMA N 7 LUTIM	133		134	
134	Anna Todung	P	FUSG				
135	Aisyah zahra	P	SMAN 9 Lutim	135		136	
136	Sahrul						
137	ALGA FAGA			137		138	
138	Citra Ayu	P	SMAN 11 LUTIM				
139	HERI IMRAN	L	SMAN 11 LUTIM	139		140	
140	PUTRA	L	- - -				
141	Naila Miranda	P	SMAN 10 Lutim	141		142	
142	Siska auna	P	SMAN 10 Lutim				
143	Fadrian Umar	L	SMA N 10 LUTIM	143		144	
144	Jumardim	L	Kewang Teruna				
145	ALAN BATTI	L	SMAN 5 Lutim	145		146	
146	Metra Iman	P	- II -				
147	Pari Fitriani	P	SMA 1 Kewuriman	147		148	
148	gracia INDI	P	- II -				
149	REFAN SYAHPUTRA	P	SMA 2 LUWU omn	149		150	
150	JOSHUA	L	- II -				

Malili, 01 Desember 2025
PPTK

WATI, S.Kom., M.M.
NIP. 19780511 200604 2 030







NOTULEN RAPAT

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

Hari/Tanggal	: Senin, 15 Desember 2025
Waktu	: pukul 09.00 sampai selesai
Tempat	: Ruang Aula Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Timur
Pimpinan Rapat	: Bupati Luwu Timur (Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan)
Notulis	: Wati,S.Kom.,MM
Peserta	: Ormas Aktif di Kabupaten Luwu Timur

Agenda Rapat

Pembahasan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di wilayah Kabupaten Luwu Timur

Pembahasan

1. Pembukaan

Rapat dibuka oleh pimpinan rapat pada pukul 09.00 WITA dan dilanjutkan dengan penyampaian tujuan rapat terkait pembinaan dan pengawasan Ormas.

2. Pemaparan Materi

- o Penjelasan dasar hukum pembinaan dan pengawasan Ormas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan)
- o Peran Kejaksaan dalam pembinaan dan pengawasan ormas (Kejaksaan Negeri)
- o Penyampaian kondisi terkini Ormas yang terdaftar dan aktif di wilayah Kabupaten Luwu Timur dan Identifikasi permasalahan dan potensi kerawanan yang melibatkan Ormas (Polres Luwu Timur)
- o Organisasi Kemastareakan dan peran pemerintah dalam ormas dan Penyampaian kondisi terkini Ormas yang terdaftar dan aktif di wilayah Kabupaten Luwu Timur (Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik)

3. Diskusi dan Tanggapan

- Perlunya peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam pengawasan Ormas.
- Pentingnya pembinaan berkelanjutan agar Ormas berperan aktif menjaga ketertiban dan persatuan masyarakat.
- Usulan kegiatan sosialisasi peraturan kepada Ormas secara berkala.

Kesimpulan dan Hasil Rapat

1. Kegiatan pembinaan dan pengawasan Ormas akan dilaksanakan secara rutin dan terjadwal.
2. Setiap Ormas diwajibkan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Akan dilakukan pendataan ulang Ormas yang aktif di wilayah Kabupaten Luwu Timur
4. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan Ormas.

Tindak Lanjut

- Menyusun jadwal pembinaan dan pengawasan Ormas.
- Menyiapkan materi sosialisasi dan pembinaan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Penutup

Rapat ditutup pada pukul 13.00 WITA

Demikian notulen rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

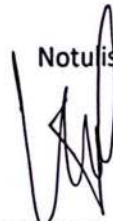
Kaban Kesbangpol,

SALAM LATIEF, SH.,M.SI.,CGCAE

Pkt : Pembina Utama Muda

NIP : 196904031989031007

Notulis,



WATI.S.Kom.,MM

Pkt : Pembina

NIP : 197805112006042030



LAPORAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS)

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pembinaan serta memperkuat mekanisme pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), maka diselenggarakan Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Ormas. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menyusun langkah strategis dalam rangka menciptakan kehidupan berormas yang tertib, kondusif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pembinaan dan pengawasan Ormas.
3. Surat Keputusan ... (Nama Instansi) tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Rakor Pembinaan dan Pengawasan Ormas Tahun ...
4. Surat Tugas/Nota Dinas ... (jika ada).

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:

Sebagai wadah koordinasi antara instansi pemerintah daerah, unsur keamanan, serta para pemangku kepentingan terkait pembinaan dan pengawasan Ormas.

Tujuan:

1. Menyampaikan kebijakan dan regulasi terbaru mengenai pembinaan dan pengawasan Ormas.
2. Mengidentifikasi permasalahan dan potensi konflik terkait aktivitas Ormas.
3. Memperkuat sinergi antarinstansi dalam pemantauan, pembinaan, dan penegakan ketentuan terhadap Ormas.
4. Menyusun rekomendasi tindak lanjut pembinaan Ormas ke depan.

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Hari/Tanggal : Senin, 15 Desember 2025

Waktu : Pukul 09.00 Wita

Tempat : Aula Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabu. Luwu Timur

V. PESERTA

Peserta rakor terdiri atas:

Perwakilan Ormas sebanyak 100 orang

VI. RANGKAIAN KEGIATAN

1. Pembukaan oleh MC
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
3. Laporan Panitia
4. Pembacaan Doa
5. Sambutan oleh Bupati Luwu Timur
6. Pemaparan Materi:
 - o Penjelasan dasar hukum pembinaan dan pengawasan Ormas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan)
 - o Peran Kejaksaan dalam pembinaan dan pengawasan ormas (Kejaksaan Negeri)
 - o Penyampaian kondisi terkini Ormas yang terdaftar dan aktif di wilayah Kabupaten Luwu Timur dan Identifikasi permasalahan dan potensi kerawanan yang melibatkan Ormas (Polres Luwu Timur)
 - o Organisasi Kemastarekatan dan peran pemerintah dalam ormas dan Penyampaian kondisi terkini Ormas yang terdaftar dan aktif di wilayah Kabupaten Luwu Timur (Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik)
7. Sesi diskusi dan tanya jawab
8. Penutupan

VIII. HASIL KEGIATAN

1. Tersampainya informasi mengenai kebijakan terbaru pembinaan dan pengawasan Ormas.
2. Teridentifikasinya permasalahan yang muncul terkait aktivitas Ormas di wilayah
3. Terbangunnya pemahaman dan komitmen bersama antar instansi terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Ormas.
4. Disepakatinya langkah tindak lanjut, antara lain:
 - o Peningkatan koordinasi rutin lintas sektor.
 - o Penguatan pendataan dan verifikasi Ormas.
 - o Penegakan aturan terhadap Ormas yang melanggar ketentuan.
 - o Peningkatan kapasitas SDM pembina Ormas.

IX. DOKUMENTASI

(Lampirkan foto kegiatan, daftar hadir, materi narasumber, notulen, dan dokumen pendukung lainnya.)

X. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Ormas ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban panitia. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan pembinaan Ormas ke depan.

PPTK,



WATI, S.Kom., MM